

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI KAMPUNG
PENUNTUNGAN KECAMATAN PENANGGALAN
KOTA SUBULUSSALAM ACEH**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

**LEDYGNE LUVITA SESA
NIM. 220405020
Program Studi Kesejahteraan Sosial**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1447 H/2026 M**

**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI KAMPUNG PENUNTUNGAN
KECAMATAN PENANGGALAN KOTA SUBULUSSALAM ACEH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Kesejahteraan Sosial

Diajukan Oleh:

**LEDYGNE LUVITA SESA
NIM. 220405020**

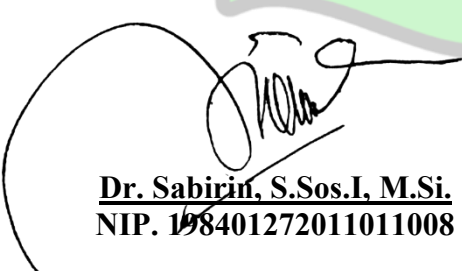
Disetujui Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Sabirin, S.Sos.I, M.Si.
NIP. 198401272011011008


Hersie Malahayatie Shandra, A.KS, M.AP.
NIP. 197504012000032001

SKRIPSI

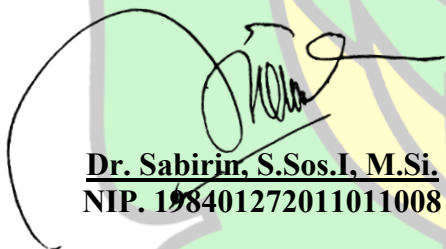
Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Kesejahteraan Sosial

Diajukan Oleh:
LEDYGNE LUVITA SESA
NIM. 220405020

Pada Hari/Tanggal
02 Februari 2026 M
Senin, 14 Sya'ban 1447 H

Di
Darussalam – Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah

Ketua



Dr. Sabirin, S.Sos.I, M.Si.
NIP. 198401272011011008

Sekretaris



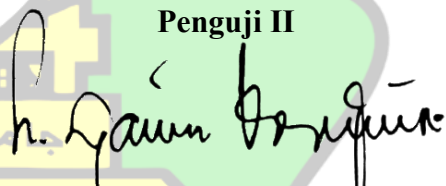
Hersie Malahayatie Shandra, A.KS, M.AP.
NIP. 197504012000032001

Penguji I



Drs. Sa'I, S.H., M.Ag.
NIP. 196406011994021001

Penguji II



Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos.
NIP. 199007212020121016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry



Prof. Dr. Kusmiwati Hatta, M.Pd.
NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Ledygne Luvita Sesa
NIM : 220405020
Jenjang : S-1
Jurusan/Prodi : Kesejahteraan Sosial

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesejahteraan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di rujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, Senin, 02 Februari 2026
Yang Menyatakan,



Ledygne Luvita Sesa
NIM. 220405020

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI KAMPUNG PENUNTUNGAN KECAMATAN PENANGGALAN KOTA SUBULUSSALAM ACEH

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi kesejahteraan masyarakat miskin di Kampung Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, yang masih membutuhkan perhatian serta perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) terutama setelah diberlakukannya sistem digital seperti SIKS-NG, Cek Bansos, dan DTSEN. Permasalahan terkait ketepatan sasaran, keterbatasan literasi digital, serta efektivitas pendampingan menjadi faktor pendorong dilaksanakannya penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam dengan pendamping PKH dan KPM, serta dokumentasi lapangan untuk memperoleh gambaran implementasi PKH secara komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Kampung Penuntungan telah berjalan sesuai pedoman, namun masih terdapat ketidakmerataan pemahaman KPM terhadap penggunaan sistem digital, kendala jaringan, serta dinamika sosial ekonomi yang memengaruhi efektivitas program. Pendamping PKH berperan penting dalam fasilitasi administrasi, verifikasi komitmen, serta pemberian penguatan melalui pertemuan P2K2. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa PKH memberi dampak positif terhadap peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga penerima manfaat, namun optimalisasi literasi digital, peningkatan akurasi data, dan penguatan pendampingan masih diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih maksimal.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, implementasi PKH, KPM, kesejahteraan sosial, digitalisasi bantuan sosial

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji beserta syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang dengan kekuasaan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat agar bisa mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengurangi Kemiskinan di Kampung Penuntungan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam Aceh”**.

Penulisan skripsi dengan judul tersebut penulis tentu saja telah melalui berbagai proses yang telah dilalui.

Shalawat beserta salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepada penghulu alam yakni Nabi Muhammad SAW yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Allah SWT yang dengan segala kuasanya telah memberikan nikmat dan anugerah berupa kesehatan dan kemampuan sehingga penulis berkesempatan mendaftar dan duduk di bangku perkuliahan UIN Ar-Raniry ini dan berjumpa dengan dosen dosen hebat dan teman-teman seperjuangan.
2. Teruntuk cinta pertama penulis proposal skripsi ini yaitu Ayah tercinta Miswanto yang di kenal sebagai Iwan, terima kasih banyak atas kasih sayang yang begitu besar dan pengorbanan yang tak terkira seberapa banyak pengorbanannya. Juga Mama tercinta Lestari, terima kasih atas tutur kata yang lembut sebagai penenang saat putri nya dalam kesulitan. Mereka adalah Orang Tua hebat bagi penulis skripsi ini berkat rezeki yang Allah SWT titipkan kepada tangan mereka sehingga penulis dapat melangkah kan kaki di UIN Ar-Raniry.
3. Teruntuk Adrea Egi Palansah, Eliska Adha Hafizah dan Nabila Puan Maghfirah terima kasih telah menjadi adik yang selalu menemani saat susah maupun senang dimana pun keberadaan di setiap kita masing-masingnya.
4. Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
5. Dr. Mahmuddin, S.Ag, M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
6. Bapak Dr. Fairuz, S.Ag, MA, selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

7. Bapak Dr. Sabirin, S.Sos.I, M.Si, sebagai Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan juga dosen di Prodi Kesejahteraan Sosial UIN Ar-Raniry yang secara bersamaan menjadi Dosen Penasihat Akademik saya. Terima kasih karena Bapak telah menasehati dan membimbing saya secara maksimal sehingga saya dapat sampai pada saat penulisan skripsi ini.
8. Ibu Hersie Malahayatie Shandra, A.KS, M.AP, yang telah mendampingi penulis sejak awal menempuh pendidikan S1 hingga sebagai dosen pembimbing kedua. Terima kasih atas bimbingan yang penuh ketulusan, perhatian yang hangat, serta pelukan yang memberi kekuatan di saat penulis hampir menyerah. Ibu bukan hanya menjadi pengajar, tetapi juga pendengar yang sabar dan sosok yang menginspirasi. Semangat dan keteguhan Ibu telah menjadi sumber motivasi bagi penulis untuk terus melangkah lebih kuat. Segala kebaikan Ibu akan selalu penulis kenang dengan rasa syukur yang mendalam.
9. Bapak Teuku Zulyadi, S.Sos.I, M.Kesos, Ph.D, selaku Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial UIN Ar-Raniry.
10. Kepada bapak Hijrah Saputra, S.Fil.I, M.Sos sebagai Sekretaris Prodi Kesejahteraan Sosial. yang selalu menjadi tempat cerita terbaik dan solusi terbaik saat mahasiswa dalam kesulitan dan ketidakpahaman dalam perkuliahan.
11. Seluruh Dosen Prodi Kesejahteraan Sosial yang telah mendidik dan memberikan ragam ilmu pengetahuan.

12. Kakak Mastura S.Si yang tidak pernah bosan untuk membantu peneliti dalam hal keadministrasian selama menjalani bangku pendidikan di Prodi Kesejahteraan Sosial.

13. kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan karya ini. Terima kasih kepada para peneliti, penulis jurnal, buku, serta berbagai sumber literatur lainnya termasuk teknologi kecerdasan buatan (AI) yang telah memberikan wawasan, data, dan referensi yang sangat membantu dalam memperkaya analisis dan memperkuat landasan teori. Dukungan pengetahuan dari berbagai sumber tersebut menjadi bagian penting dalam terselesaikannya karya tulis ini.

14. *Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for always being a giver and trying give more than i receive, i wanna thank me for trying to do more right than wrong, i wanna thank me for just being me all times.*

Penulis masih menyadari bahwasanya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu harapan penulis agar diberikan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang konstruktif dari para pembaca untuk lebih menyempurnakan kemampuan penulis pada kesempatan-kesempatan selanjutnya.

Banda Aceh, 27 Januari 2026


Ledygne Luvita Sesa

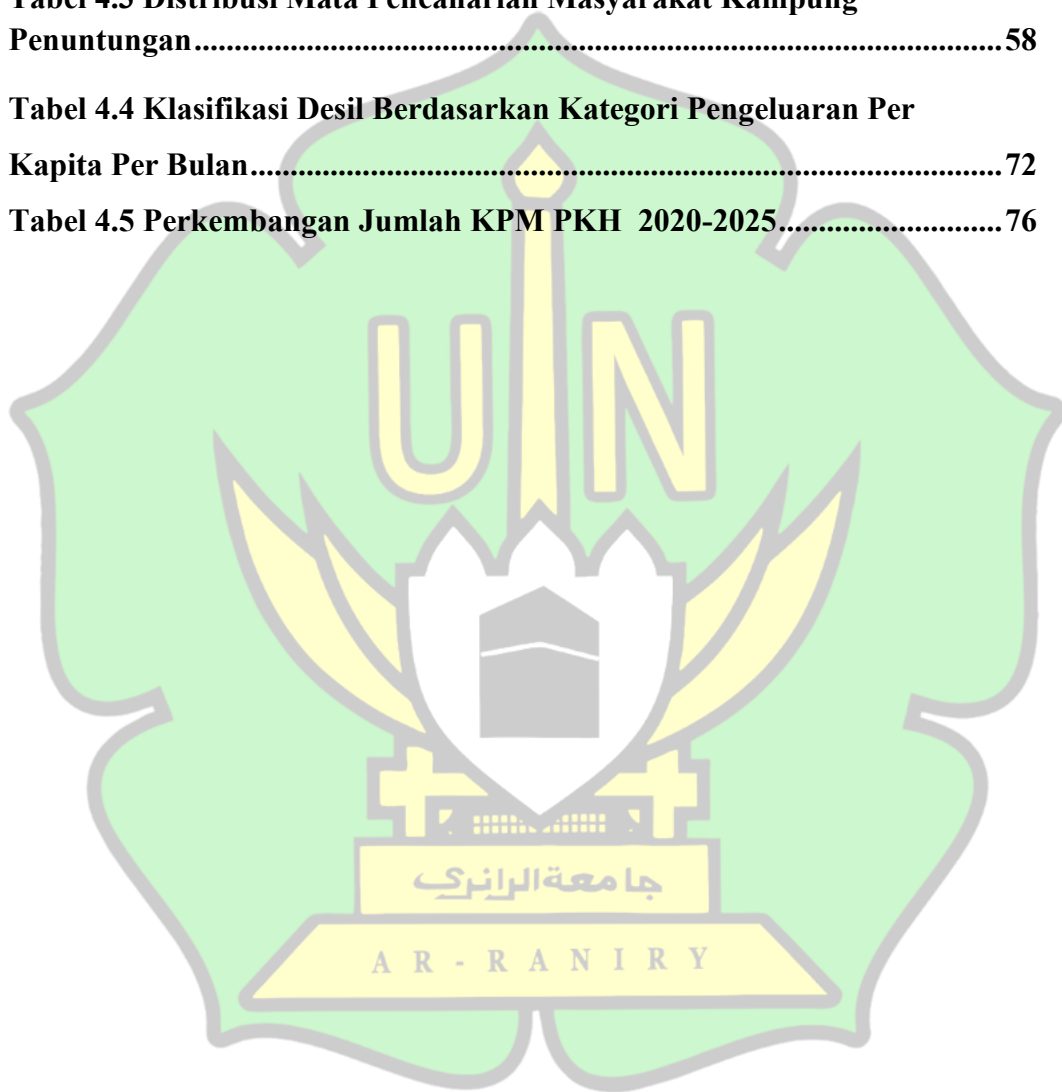
DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR DIAGRAM	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
1. Secara Teoritis.....	9
2. Secara Praktis.....	10
BAB II	11
KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan.....	11
B. Kerangka Pemikiran.....	13
1. Implementasi	13
2. Program Keluarga Harapan (PKH).....	15
3. Kemiskinan	23
BAB III.....	28
METODELOGI PENELITIAN.....	28
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian.....	28
1. Fokus Penelitian	28
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	31
B. Pendekatan dan metode penelitian.....	35
C. Informan Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel	37
1. Informan Penelitian	37
2. Teknik Pengambilan Sampel	39

D.	Teknik Pengumpulan Data	40
1.	Observasi Partisipatif	40
2.	Wawancara	42
3.	Studi Dokumentasi.....	45
4.	Kunjungan Rumah (<i>Home Visit</i>)	46
E.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data	46
BAB IV		48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		48
B.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	48
1.	Kondisi Wilayah dan Demografi Kampung Penuntungan	48
2.	Kondisi Sosial dan Ekonomi Kampung Penuntungan	55
3.	Gambaran Umum Kondisi KPM PKH Kampung Penuntungan .	59
B.	Hasil Penelitian dan Pembahasan	62
1.	Implementasi PKH di Kampung Penuntungan	63
2.	Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PKH di Kampung Penuntungan.....	76
3.	Dampak PKH Terhadap Kesejahteraan Masyarakat kampung Penuntungan.....	83
BAB V.....		89
PENUTUP.....		89
A.	Kesimpulan	89
B.	Saran	91
DAFTAR PUSTAKA		94
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		98
LAMPIRAN		99

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian	38
Tabel 4.1 jumlah KK dihitung pada Setiap Dusun Kampung Penuntungan	50
Tabel 4.2 Fasilitas Kampung Penuntungan.....	51
Tabel 4.3 Distribusi Mata Pencaharian Masyarakat Kampung Penuntungan.....	58
Tabel 4.4 Klasifikasi Desil Berdasarkan Kategori Pengeluaran Per Kapita Per Bulan.....	72
Tabel 4.5 Perkembangan Jumlah KPM PKH 2020-2025.....	76



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1 Distribusi Mata Pencaharian Masyarakat Kampung Penuntungan.....	58
--	-----------



DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Klasifikasi Desil Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan.....71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Surat Izin Penelitian di Dinas Sosial Kota Subulussalam
Lampiran 1	: Surat Izin Penelitian di Kampung Penuntungan
Lampiran 3	: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 4	: Foto Dokumentasi Penelitian
Lampiran 5	: Foto Dokumentasi Sidang Munaqasyah Skripsi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah yang paling mendasar yang dihadapi hampir di seluruh negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami tantangan untuk menurunkan angka kemiskinan yang dapat berdampak pada berbagai sektor kehidupan. Keberadaan kemiskinan ini dapat menghambat pencapaian tujuan dan cita-cita negara. Pemerintah menyadari bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, tetapi juga kuat kaitannya dengan rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, teknologi, serta kualitas hidup yang layak.

Pemerintah telah merancang berbagai program yang strategis dan diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program-program tersebut bertujuan memberdayakan sumber daya manusia melalui pendekatan multisektor, meliputi aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah dalam hal tersebut, ini merupakan bagian dari upaya yang sistematis untuk menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan dan mendorong kemandirian masyarakat miskin.¹

¹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, (Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, 2021), hal. 1–3.

Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional dalam menangani permasalahan kemiskinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara;
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak; dan
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Ketentuan konstitusional ini kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penanganan kemiskinan dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain: pemberdayaan kelembagaan masyarakat, peningkatan kapasitas fakir miskin dalam mengembangkan keterampilan dasar dan kemampuan berusaha, pemberian jaminan serta perlindungan sosial, kerja sama dengan berbagai pihak, serta koordinasi yang sinergis antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.²

² Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 7

Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan publik dan program Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berfokus pada peningkatan kesehatan dan pendidikan. Hingga saat ini, berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan melalui program kebijakan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), serta Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT DD), dan lainnya.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH), PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Data ini diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH ditetapkan dari sana. Bantuan sosial ini bertujuan untuk menjalankan program penanggulangan kemiskinan, yang mencakup perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, serta pelayanan dasar.³

PKH bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui akses yang lebih baik ke layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program ini juga bertujuan untuk mengurangi beban biaya hidup serta meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, selain itu PKH berupaya mengubah perilaku dan meningkatkan kemandirian KPM dalam memanfaatkan

³ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

layanan tersebut. Tujuan lainnya termasuk menurunkan angka kemiskinan, memutus rantai kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, serta memperkenalkan penggunaan produk dan layanan keuangan formal kepada penerima bantuan.

PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaan PKH memiliki dasar hukum yang kuat karena dijalankan berdasarkan amanah dari berbagai peraturan perundang-undangan.

PKH berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh jaminan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.⁴ Selain itu, dasar hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menegaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri.⁵ Kemudian, Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tindak Percepatan Pencapaian Sasaran Program Pro-Rakyat mempercepat pencapaian sasaran program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan, termasuk PKH.⁶ Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mengatur koordinasi lintas kementerian/lembaga

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2004).

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2009).

⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tindak Percepatan Pencapaian Sasaran Program Pro-Rakyat*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2010).

dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.⁷ Sebagai pedoman pelaksanaan, Kementerian Sosial Republik Indonesia menerbitkan *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* yang menjadi acuan teknis dan operasional dalam pelaksanaan PKH di seluruh wilayah Indonesia.⁸

PKH merupakan program jaminan sosial yang unik karena, di satu sisi, memberikan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. namun, di sisi lain, PKH juga berfokus pada pemberdayaan, dengan tujuan memperkuat rumah tangga miskin agar mampu keluar dari kemiskinan melalui peningkatan kesehatan dan mendorong anak-anak untuk bersekolah. Sasaran PKH adalah keluarga sangat miskin dan rentan yang tercatat dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, dengan komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.⁹

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Subulussalam, jumlah penduduk di Kampung Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, pada tahun 2024 berjumlah 1.751 jiwa.¹⁰ Pada tahun 2025, tercatat ada sebanyak 61 peserta Penerima Manfaat (PM) PKH di Kampung Penuntungan, data ini diperoleh

⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: Sekretariat Negara, 2010).

⁸ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, (Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, 2021).

⁹ Agnes Pradina S, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes", Tesis, (Semarang: UNNES, 2019), hal. 7-8.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam, *Kecamatan Penanggalan Dalam Angka 2024*, tabel "Jumlah Penduduk per Desa/Kelurahan".

langsung dari koordinator PKH Kampung Penuntungan melalui Dinas Sosial Kota Subulussalam. Dari jumlah data 302 KK ada sebanyak 125 KK yang di data sebagai masyarakat tidak mampu data ini diperoleh berdasarkan musyawarah desa atau pendataan Kampung Penuntungan.¹¹

Seiring dengan perkembangan teknologi, proses pendaftaran sebagai calon penerima bantuan PKH dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dikarenakan pendaftaran sebagai calon penerima PKH telah beralih ke sistem digital melalui aplikasi resmi yang disediakan oleh pemerintah. Transformasi ini bertujuan untuk mempercepat pendataan serta memastikan transparansi dan ketepatan sasaran penerima bantuan. sejak tahun 2020, Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai mendorong digitalisasi sistem penerimaan peserta PKH melalui pengembangan aplikasi seperti Cek Bansos dan SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation).¹²

Tahun 2021 aplikasi Cek Bansos resmi diluncurkan dan dapat diakses oleh masyarakat melalui ponsel pintar. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengecek status ke peserta bantuan sosial, serta mengusulkan diri sendiri atau orang lain sebagai calon penerima manfaat. Sejak saat itu, proses pendataan dan

¹¹ Informasi diperoleh melalui wawancara koordinator PKH Kecamatan Penanggalan (Dinas Sosial Kota Subulussalam) dan data musyawarah desa Kampung Penuntungan (Kantor Desa Penuntungan).

¹² Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Aplikasi Cek Bansos, Inovasi Kementerian Sosial untuk Pengelolaan Bansos Tepat Sasaran*, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2022), tersedia di situs resmi Kemensos: kemensos.go.id.

pengusulan penerima bantuan semakin berbasis digital dan terintegrasi melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, pendamping PKH juga memanfaatkan aplikasi e-PKH untuk mencatat perkembangan dan kegiatan keluarga penerima manfaat secara langsung di lapangan.¹³

Implementasi sistem digital ini masih menghadapi hambatan di beberapa wilayah, termasuk Kampung Penuntungan. Keterbatasan infrastruktur, rendahnya pengetahuan terkait aplikasi digital, serta sulitnya akses terhadap jaringan internet yang stabil menjadi tantangan utama. Kondisi tersebut menyulitkan masyarakat kurang mampu yang belum terbiasa menggunakan teknologi, sehingga mereka berisiko tidak terdata atau tertinggal dalam memperoleh haknya atas bantuan sosial.

PKH telah dilaksanakan di Kampung Penuntungan, namun hingga kini belum terdapat kajian komprehensif yang menganalisis secara sistematis dampak program tersebut, khususnya dalam konteks pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana kontribusi PKH dalam menurunkan angka kemiskinan di kampung penuntungan, sekaligus meneliti berbagai kendala yang dihadapi dalam proses implementasinya. Salah satu hambatan utama yang muncul adalah ketimpangan digital antara masyarakat miskin dan masyarakat yang lebih mampu, di mana akses terhadap perangkat teknologi, jaringan internet, dan pengetahuan terkait perkembangan digital masih belum merata. Ketimpangan ini berpotensi menghambat masyarakat miskin dalam

¹³ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, (Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, 2021), hal. 39-40.

mengakses informasi, mendaftar bantuan, maupun memanfaatkan layanan berbasis digital secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini juga mengidentifikasi solusi yang relevan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PKH melalui pendekatan digital yang lebih adil, inklusif dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi PKH di Kampung Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam ?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan PKH di Kampung Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam ?
3. Bagaimana dampak PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk melakukan asesmen komprehensif bagaimana implementasi PKH di Kampung Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam.
2. Untuk melakukan asesmen komprehensif faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan PKH di Kampung Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam.

3. Untuk melakukan asesmen komprehensif Bagaimana dampak PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam.

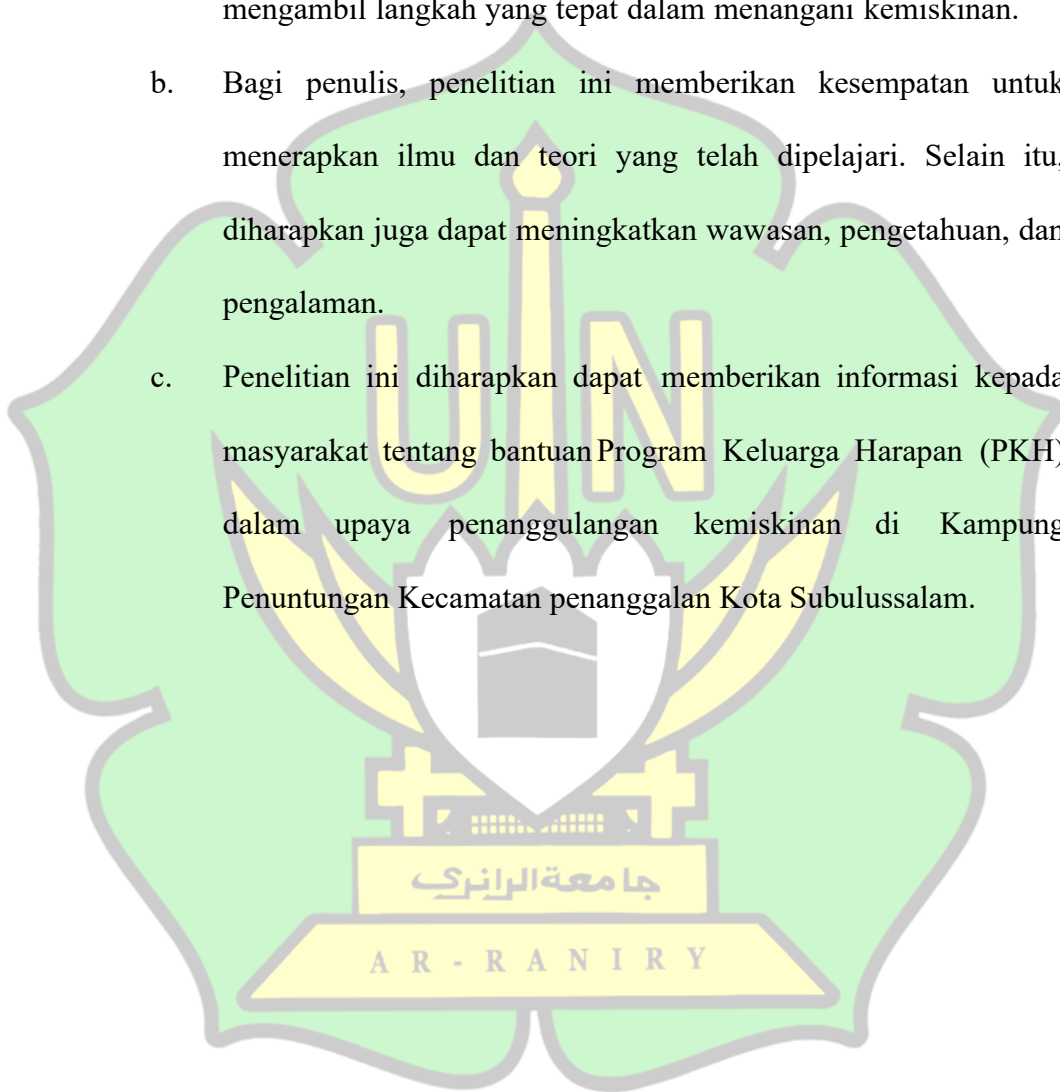
D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini berguna untuk memperluas pengetahuan di bidang sosial melalui pelaksanaan riset yang akan memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya terkait efektivitas bantuan sosial bersyarat seperti PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Penuntungan.
- b. Penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai sumber pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti dan mahasiswa lainnya, sehingga mereka dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana PKH ini bekerja, apakah akan bekerja sesuai dengan visi misi dari program tersebut atau tidak. Serta bagaimana kinerja dari aparat desa dalam mengimplementasikan PKH di Kampung Penuntungan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam.
- c. Secara teoritis, penelitian ini juga dapat membantu mengukur menentukan apakah PKH ini benar-benar memberikan dampak positif sesuai dengan teori tentang kebijakan kesejahteraan sosial yang di terapkan di dalamnya.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan kepada pemerintah daerah atau lebih tepatnya aparat desa dalam Menyusun kebijakan sosial yang lebih tepat sasaran dan untuk mengambil langkah yang tepat dalam menangani kemiskinan.
- b. Bagi penulis, penelitian ini memberikan kesempatan untuk menerapkan ilmu dan teori yang telah dipelajari. Selain itu, diharapkan juga dapat meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kampung Penuntungan Kecamatan penanggalan Kota Subulussalam.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Alfiyaturrohmah dan Zudi Setiawan (2023) berjudul *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Kemiskinan di Desa Ngagel, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati Tahun 2021* berfokus pada efektivitas pelaksanaan PKH dalam membantu masyarakat miskin di desa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH di Desa Ngagel sudah berjalan sesuai pedoman, banyak masyarakat yang merasa terbantu, terutama dalam biaya pendidikan dan kesehatan. Namun, program ini belum sepenuhnya mampu mengurangi angka kemiskinan karena belum adanya pemberdayaan ekonomi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun PKH meringankan beban ekonomi, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi.¹⁴

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Khumaidi dan Lailatuz Zahro (2024) berjudul *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan*. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan PKH yang diinisiasi oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan melalui bantuan tunai bersyarat. Program ini didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa implementasi PKH di Desa Sukorejo

¹⁴ Alfiyaturrohmah, & Setiawan, Z. (2023). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam penanggulangankemiskinan di desa Ngagel kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2021. SPEKTRUM, 2(2), 35–49.

telah berdampak positif, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. PKH membantu keluarga miskin untuk lebih fokus pada pendidikan anak-anak mereka serta memastikan akses kesehatan yang lebih baik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Sukorejo diikuti oleh peningkatan jumlah penerima manfaat (KPM) dari 152 pada tahun 2022 menjadi 195 pada tahun 2024, menunjukkan adanya peningkatan jumlah masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.¹⁵

Ketiga, Yahriani dengan judul penelitian Kontribusi Program Keluarga Harapan dalam Menunjang Pendidikan Siswa Kurang mampu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terdapat 16 informan yang dipilih menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki anak lebih dari 1 orang yang sedang sekolah, berdasarkan pekerjaan orang tua, orang tua tunggal, anak yang berprestasi, dan anak yang tidak berprestasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dan pengabsahan data menggunakan *member check*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PKH memberikan dampak positif seperti meringankan beban pengeluaran bagi RTSM, meningkatkan kehadiran siswa di sekolah, dan memungkinkan anak-anak RTSM menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun, tetapi juga memiliki dampak *negative* seperti salah sasaran dan masyarakat menjadi tergantung pada bantuan PKH.¹⁶

¹⁵ Virgoreta, T. D. A., Nur Pratiwi, R., & Suwondo. (2015). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurusan Administrasi Publik*, 2, No. 12, 1–6.

¹⁶ Syahriani, Judul Skripsi, “Kontribusi Program Keluarga Harapan dalam Menunjang

Keempat, Liahati, dan Dewi Citra Larasati dengan judul penelitian Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. Metode penelitiannya menggunakan deskriptif kualitatif dengan *snowball* sampling. Dari hasil tersebut terlihat bahwa pelaksanaan PKH untuk mengurangi kemiskinan melalui empat hal penting yaitu proses komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi yang baik dan bertanggung jawab, rasa peduli, memotivasi dan membangkitkan kesadaran program keluarga. peserta dalam memenuhi tujuan dan harapan mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program adalah faktor pendukung yang terlihat dari dukungan pemandu dan dorongan kepada peserta agar lebih sadar akan pentingnya teknologi dan kehidupan yang layak. Faktor penghambat cenderung muncul karena kurangnya respons dari atasan terhadap permasalahan yang dihadapi peserta PKH.¹⁷

B. Kerangka Pemikiran

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan. Sementara itu, berdasarkan penggunaannya implementasi adalah tindakan, tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Gordon mendefinisikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat yang berwenang untuk mencapai tujuan program. Kebijakan yang berbeda dari yang direncanakan.

Pendidikan Siswa Kurang mampu”, (Universitas Negeri Makassar Fakultas Ilmu Sosial Makassar 2016): 78

¹⁷ Liahati, dan Dewi Citra Larasati. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu." JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 7.2 (2019): 78.

Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.¹⁸ Pasalong mengatakan bahwa hal ini disebabkan adanya bias dalam implementasi kebijakan yang menjadi isu penting yang harus disikapi oleh pelaksana dengan harapan agar pembuatan kebijakan dapat berhasil dilaksanakan.¹⁹

Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Dewi Rahayu, mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.²⁰

¹⁸ Mulyadi, Deddy, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses dan Kebijakan pelayanan publik*, (Bandung : Alfabeta, 2015), hal 56.

¹⁹ Harbani Pasalong, M, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hal 36.

²⁰ Dewi Rahayu K, *Study Analisis Kebijakan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2016) , hal 157.

Berdasarkan asal usul kata, implementasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan. Implementasi adalah proses interaktif antara menetapkan tujuan dan mengambil tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi, inti fundamental dari implementasi adalah “membangun hubungan” dan mata rantai dalam rantai kebijakan untuk mempengaruhi kebijakan. Terdapat empat unsur yang hendaknya di pertimbangkan untuk diperhatikan dalam teknik pelaksanaan atau implementasi dalam suatu kegiatan yang mengandung unsur sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, adanya proses, hasil yang ingin di capai dan menyangkut masa depan dalam waktu tertentu.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan yang disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat yang di berikan kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfer* (CCT), ini terbukti cukup berhasil dengan menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di Negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.²¹

²¹ Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2021), hlm. 1.

Program bantuan sosial bersyarat ini memberikan akses bagi KM, terutama ibu hamil dan anak, untuk memanfaatkan berbagai Fasilitas Layanan Kesehatan (FASKES) dan Fasilitas Layanan Pendidikan (FASDIK) yang tersedia di lingkungan mereka. Manfaat PKH juga diperluas untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia guna mempertahankan taraf kesejahteraan sosial sesuai amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI. Melalui PKH, KM didorong agar dapat mengakses dan memanfaatkan layanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, pendampingan, serta berbagai program perlindungan sosial lainnya yang bersifat komplementer dan berkelanjutan.²²

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86 persen dari total penduduk sebanyak 28,01 juta jiwa. Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8 persen pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (giniratio) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).²³

²² Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2021), hlm. 12.

²³ Kementerian PPN/Bappenas, *RPJMN 2015–2019*, (Jakarta: Bappenas, 2015), hlm. 45.

KPM harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Kewajiban KPM PKH dibidang kesehatan meliputi pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang berat badan anak balita dan anak prasekolah. Sedangkan kewajiban di bidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarga PKH kesatuan pendidikan sesuai jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Pertama.²⁴

a. Aspek-Aspek PKH

PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui pemenuhan kebutuhan dasar serta penguatan kesejahteraan sosial. Pelaksanaan PKH difokuskan pada beberapa aspek utama yang saling berkaitan, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, sebagai upaya strategis dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Aspek kesehatan diarahkan pada peningkatan akses dan pemanfaatan layanan kesehatan dasar, khususnya bagi ibu hamil dan anak, aspek pendidikan bertujuan mendorong keberlanjutan pendidikan anak agar terhindar dari putus sekolah dan berbagai risiko sosial, sementara aspek kesejahteraan sosial difokuskan pada perlindungan dan peningkatan kualitas hidup kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia.²⁵

²⁴ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2021), hlm. 25.

²⁵ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)* (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2021), hlm. 3–6.

1) PKH Aspek Kesehatan

Rendahnya penghasilan menyebabkan keluarga miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan bahkan untuk tingkat minimal sekalipun. Pemeliharaan kesehatan ibu hamil yang tidak memadai berakibat pada buruknya kondisi kesehatan dan asupan gizi bayi yang dilahirkan. Kejadian balita stunting (pendek) merupakan masalah gizi utama yang dihadapi Indonesia.²⁶

2) PKH Aspek Pendidikan

Tingginya angka putus sekolah menyebabkan peringkat indeks pembangunan rendah. Oleh karena itu mendorong anak untuk tetap bersekolah pada usia remaja menjadi hal mendasar. Keikutsertaan mereka yang berada di luar sistem sekolah pun harus menjadi perhatian utama. Tanpa perhatian khusus pemerintah anak putus sekolah rentan menjadi korban eksploitasi, termasuk perdagangan anak. Bahkan mereka rentan pula terhadap pelanggaran hukum dari penyalahgunaan obat terlarang sampai dengan kriminalitas.

Putus sekolah juga berdampak pada minimnya wawasan/ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh anak, masa depan anak tidak jelas, menyebabkan banyaknya pengangguran di masa mendatang, dan di masa mendatang anak akan cenderung berpikiran lebih mementingkan adat/budaya dari pada pendidikan.

²⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2018). Hal 22.

3) PKH Aspek Kesejahteraan Sosial

Selain memberikan dukungan di bidang kesehatan dan pendidikan, PKH juga berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan. Kelompok ini meliputi penyandang disabilitas dan lanjut usia yang dianggap membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Kedua kelompok tersebut sering menghadapi keterbatasan fisik, psikologis, maupun sosial yang membuat mereka sulit memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. Melalui PKH, pemerintah berupaya memastikan bahwa penyandang disabilitas dan lanjut usia memperoleh perlindungan, layanan, serta fasilitas yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan mereka.²⁷

b. Tujuan dan Sasaran PKH

PKH merupakan program perlindungan sosial bersyarat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, sekaligus mengurangi beban pengeluaran serta mendorong kemandirian keluarga. Sasaran PKH adalah keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu dan memiliki komponen pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial, termasuk keluarga yang berada di wilayah terpencil, tertinggal, dan sulit dijangkau layanan dasar melalui skema PKH akses. pemahaman mengenai tujuan dan sasaran PKH menjadi penting sebagai dasar dalam menganalisis implementasi program ini di tingkat lokal.

²⁷ Mardimin, Yohanes. *Krisis Sosial dan Proses Pembangunan di Indonesia*. (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hal 65.

1) Tujuan PKH

PKH memiliki beberapa tujuan yang saling berkaitan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan KPM. Program ini diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup KPM melalui perluasan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, sekaligus mengurangi beban pengeluaran serta mendorong peningkatan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Selain itu, PKH bertujuan menciptakan perubahan perilaku yang lebih positif dan menumbuhkan kemandirian keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.²⁸

2) Sasaran PKH

Sasaran PKH merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Sasaran PKH akses merupakan keluarga miskin dan rentan yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial yang berada di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, daerah terpencil atau tertinggal, serta perbatasan antar negara.²⁹

²⁸ Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2021), hlm. 22.

²⁹ Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2021), hlm. 24.

c. Kriteria Penerima Bantuan Sosial PKH

PKH memiliki kriteria komponen penerima bantuan sosial meliputi komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial

1) Kriteria Komponen Kesehatan

- a) Ibu hamil/menyusui
- b) Anak berusia 0 sampai dengan 6 tahun

2) Kriteria Komponen Pendidikan

- a) Anak Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat
- b) Anak Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau sederajat.
- c) Anak Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah atau sederajat
- d) Anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

3) Kriteria Komponen Kesejahteraan Sosial

- a) Lanjut usia mulai dari 60 tahun
- b) Penyandang distabilitas diutamakan penyandang distabilitas yang berat.³⁰

³⁰ Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2021), hlm. 22.

d. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH

1) Hak KPM PKH

KPM PKH berhak mendapatkan:

- a) Menerima bantuan sosial
- b) Pendampingan sosial
- c) Pelayanan difasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial
- d) Program bantuan komplementer di bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi Energy, ekonomi, perumahan, aset kepemilikan tanah dan bangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.³¹

2) Kewajiban KPM PKH

Kewajiban peserta PKH terdiri atas empat hal, di antaranya:

- a) Anggota keluarga memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) bulan.
- b) Anggota keluarga mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun.

³¹ Kementerian Sosial RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan (PKH)*, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2021), hlm. 24.

- c) Anggota keluarga mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 tahun atau penyandang distabilitas.
- d) KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) setiap bulan.³²

e. Mekanisme Penyaluran Bantuan PKH

Mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunai meliputi beberapa kegiatan yang pada tahap awal yaitu dengan melakukan pembukaan rekening penerima bantuan sosial, melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi, distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), proses penyaluran bantuan sosial PKH, melakukan Penarikan dana bantuan sosial (PKH), Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH, melakukan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyaluran bantuan sosial.³³

3. Kemiskinan

a. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan

³² Duntji, Munawar. *Memahami Pengertian dan Kebijakan dalam APBN*. (Bandung: Mandar Madju, 2014), hal 45.

³³ Wibawa, Samodera. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. (Jakarta: Intermedia, 2000), hal 89.

atau tingkat kemiskinan atau jumlah orang hidup di bawah garis kemiskinan. Memahami kemiskinan secara multidimensional pada prinsipnya standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal atau pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.³⁴

Berdasarkan kondisi tersebut, suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk menyejahterakan dirinya.

b. Bentuk-Bentuk Kemiskinan

Penduduk miskin hidup tanpa adanya kebebasan pokok dan pilihan yang lebih baik. Mereka sering kali tidak cukup dalam hal makanan dan pemukiman, pendidikan dan kesehatan, perbedaan dalam rasa aman seperti layaknya orang hidup. Mereka juga rentan terhadap penyakit, dan ekonomi yang buruk. Masyarakat miskin sering kali mendapatkan perlakuan buruk oleh Negara dan kurangnya kekuatan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, hal tersebut merupakan dimensi dari kemiskinan. Berikut merupakan bentuk kemiskinan.

³⁴ Farhan, Yunus.. *Problematik Kemiskinan di Indonesia*. (Bandung: Alumni, 2006), hal 67.

1) Kemiskinan Pendapatan

Kemiskinan pendapatan adalah seseorang dikatakan miskin jika dan hanya pendapatannya di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan sebagai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan khususnya makan.

2) Kemiskinan Manusia

Kemiskinan manusia diartikan dengan menggambarkan melalui tiga perspektif kemiskinan-pendapatan, kebutuhan dasar dan kapabilitas dan merumuskannya dalam satu indeks kemiskinan manusia, yakni berdasarkan tingkat umur, pengetahuan, dan standar hidup layak.

3) Kemiskinan Kebutuhan Dasar

Kemiskinan kebutuhan dasar yaitu kemiskinan yang merupakan ketiadaan kebutuhan material untuk mencukupi kebutuhan minimal hidup termasuk makan.

4) Kemiskinan Kemampuan

Kemiskinan kemampuan yaitu kemiskinan kapabilitas yang merupakan tidak adanya kemampuan dasar untuk berfungsi sebagai manusia karena tidak adanya kesempatan untuk mencapainya.³⁵

³⁵ Hamzah, Awaluddin. 2008. *Kemiskinan di Desa, Struktural dan Kultural*. Jakarta: Bima Aksara.

c. Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan di Negara Indonesia pada umumnya biasanya disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang meningkat, masalah angkatan pekerjaan, tingkat pendidikan yang rendah dan kurang perhatian dari pemerintah. Penjelasan pada beberapa penyebab kemiskinan tersebut akan di jelaskan pada pembahasan sebagai berikut:

1) Laju Pertumbuhan Penduduk

Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesia semakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan.

2) Angkatan Kerja

Penduduk yang bekerja dan pengangguran. Secara garis besar penduduk suatu Negara dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagai tenaga kerja ialah penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda setiap Negara yang satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 10 tahun tanpa batas usia maksimum.

3) Tingkat Pendidikan Rendah.

Rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu Negara. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya perkembangan ekonomi terutama industri, dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai *skill* paling tidak dapat membaca dan menulis.

4) **Kurangnya Perhatian dari Pemerintah.**

Pemerintah yang kurang peka terhadap laju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu faktor kemiskinan. Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat kemiskinan di negaranya.³⁶



³⁶ Wirutomo. *Kemiskinan Absolut dan Kemiskinan Struktural di Indonesia*. (Jakarta: Bina Cipta, 2007), hal 42.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini di fokuskan pada penelitian kajian pada Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kampung Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi secara mendalam tentang bagaimana pelaksanaan program tersebut dijalankan dan sejauh mana pengaruhnya dalam mengurangi kemiskinan di masyarakat setempat.

Fokus ini muncul karena PKH adalah salah satu program perlindungan sosial bersyarat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 2007. Program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dengan memberikan bantuan finansial kepada keluarga yang memenuhi kriteria tertentu, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selain mendapatkan bantuan keuangan, penerima manfaat program ini di minta untuk berpartisipasi aktif dalam layanan sosial dasar seperti sekolah anak-anak dan pemeriksaan kesehatan ibu dan anak. Diproyeksikan bahwa ini akan mengakhiri rantai kemiskinan antar generasi dalam jangka panjang.³⁷

³⁷ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*, (Jakarta: Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, 2021), hal. 34-35.

Penelitian ini akan dilakukan secara mendalam dengan tujuan untuk mengamati dan memahami berbagai aspek penting dari pelaksanaan PKH di lapangan, khususnya di Kampung Penuntungan. Adapun aspek-aspek penting yang menjadi titik perhatian dalam penelitian ini meliputi :

a. Proses Pelaksanaan Program

Proses pelaksanaan program mencakup proses identifikasi, seleksi dan verifikasi data KPM, mekanisme penyaluran bantuan, dan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap keputusan KPM terhadap kewajiban program.

b. Peran Pendamping Sosial PKH

Peran pendamping sosial PKH, yang berfungsi sebagai penghubung utama antara pemerintah pusat dan penerima bantuan di lapangan pendamping sosial tidak hanya bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan bantuan, tetapi mereka juga bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan, melakukan kunjungan rumah, mendorong pertemuan kelompok, dan mendorong perubahan perilaku di tingkat rumah tangga.³⁸

³⁸ Suharto, dan Edi, *Kebijakan Sosial: Sebuah Pengantar*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 165.

c. Partisipasi dan Pemahaman Masyarakat

Sangat penting untuk mengetahui tingkat partisipasi dan pemahaman masyarakat, khususnya KPM, terhadap isi, tujuan, dan mekanisme pelaksanaan program. Hal ini penting untuk menentukan tingkat kesadaran dan sikap masyarakat tentang mengikuti program dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkannya secara efektif.

d. Dampak Program Terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi

Dampak program terhadap kondisi sosial dan ekonomi KPM termasuk perubahan yang terjadi setelah menerima bantuan, seperti partisipasi sekolah anak yang meningkat, akses ke layanan kesehatan yang lebih baik, perubahan pola pengeluaran rumah tangga, dan persepsi subjektif tentang kesejahteraan.³⁹

e. Hambatan dan Tantangan

PKH di tingkat desa dan kampung terkadang menghadapi tantangan administratif, sosial, geografis, dan teknis, seperti pencairan dana yang tertunda, data yang salah, kurangnya koordinasi lintas sektor, dan masalah komunikasi antara pendamping dan masyarakat.

³⁹ Creswell, J. W, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal. 183.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini menetapkan batasan ruang lingkup secara sistematis untuk mengonsentrasikan analisis pada subjek dan fenomena yang diteliti, yaitu pelaksanaan PKH dalam upaya mengurangi kemiskinan di Kampung Penuntungan. Karena pendekatan kualitatif tidak mengutamakan kuantifikasi luas, tetapi mengutamakan makna dan konteks sosial dari fenomena mencakup ruang lingkup menjadi penting karena memungkinkan peneliti untuk menghindari membahas hal-hal yang berada di luar fokus penelitian dan membuat data lebih tajam dan mendalam.

Creswell berpendapat bahwa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan “ruang lingkup” penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mempelajari fenomena dengan lebih rinci dan memungkinkan pembaca untuk memahami konteks penelitian yang dibahas dengan lebih jelas.⁴⁰ Sugiyono, di sisi lain, menyatakan bahwa cakupan ruang lingkup adalah salah satu prinsip utama dalam metode pengembangan penelitian untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh relevan, sistematis, dan tidak menyimpang dari tujuan awal.⁴¹ Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian ini dibatasi secara sistematis agar hasil yang diperoleh lebih terfokus dan mendalam. Ruang lingkup tersebut meliputi ruang lingkup wilayah, ruang lingkup waktu, ruang lingkup subjek dan ruang lingkup substansi.

⁴⁰Creswell, J. W, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), Hal. 183.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 21.

a. Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian ini hanya dilakukan di Kampung Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Aceh. Dikarenakan wilayah ini memiliki keberagaman sosial, keterlibatan aktif. Masyarakat dalam pelaksanaan PKH, dan jumlah data dan informasi yang cukup. Lokasi di pilih secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian dan mendalam.⁴²

b. Ruang Lingkup Waktu

Ruang lingkup waktu kajian PKH terbatas pada tahun 2023-2025. Batasan ini di buat untuk memastikan bahwa informan yang dikumpulkan mencerminkan perkembangan program yang sedang berlangsung dan juga agar analisis yang dilakukan dapat menggambarkan konteks ekonomi serta sosial masyarakat secara aktual dan relevan dengan keadaan yang sedang terjadi di lapangan pada saat penelitian dilakukan.⁴³

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kontekstual dan menyeluruh tentang PKH di tingkat desa, khususnya di Kampung Penuntungan, berdasarkan batasan dan fokus yang telah ditetapkan. Penelitian ini juga berupaya untuk mengkaji sejauh mana PKH dapat menjadi intervensi sosial yang efektif untuk mengatasi masalah

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 133.

⁴³ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2014), hal. 57.

kemiskinan struktural yang dialami oleh rumah tangga miskin. Dalam hal ini, pendekatan penelitian difokuskan pada aspek implementasi di lapangan, keterlibatan para pelaksana inti, serta pengalaman langsung dari KPM. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi realitas sosial dan dinamika lokal yang mempengaruhi keberhasilan dan dinamika lokal yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala program. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi upaya untuk meningkatkan pelaksanaan PKH di masa mendatang.

c. Ruang Lingkup Subjek

Ruang lingkup subjek pada penelitian ini peneliti melibatkan individu atau kelompok yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan dan penerimaan PKH, seperti pendamping sosial PKH, KPM yang aktif menerima bantuan, dan aparat desa atau pemangku kepentingan lokal lainnya yang memahami konteks dan pelaksanaan program secara menyeluruh.

d. Ruang Lingkup Substansi

Penelitian ini tidak bertujuan untuk menyebarkan PKH secara nasional atau membandingkan daerah, tetapi hanya mempelajari bagaimana program PKH secara lokal. Sebaliknya, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana program PKH diterapkan dan diterima oleh masyarakat di Kampung Penuntungan. Selain itu, karena

pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, ia tidak fokus pada pengukuran efektivitas secara statistik; sebaliknya, ia menekankan pencarian makna, pemahaman sosial, dan pengalaman subyektif penerima manfaat.⁴⁴

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran kontekstual dan menyeluruh tentang pelaksanaan PKH di tingkat desa, khususnya di Kampung Penuntungan, berdasarkan batasan dan fokus yang telah ditetapkan. Penelitian ini juga berupaya untuk mengkaji sejauh mana PKH dapat menjadi intervensi sosial yang efektif untuk mengatasi masalah kemiskinan struktural yang dialami oleh rumah tangga miskin. Pendekatan penelitian ini di fokuskan pada aspek implementasi di lapangan, keterlibatan para pelaksana inti, serta pengalaman langsung dari KPM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi realitas sosial dan dinamika lokal yang mempengaruhi keberhasilan dan dinamika lokal yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala program. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi upaya untuk meningkatkan pelaksanaan PKH di masa mendatang.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 21.

B. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif. Whitney yang dikutip Muh Khalifah Mustamin berpendapat bahwa metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pencarian fakta dengan intervensi yang tepat, penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu. Penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, sebagai situasi atau berbagai fenomena realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu.⁴⁵

Pendekatan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi sosial secara menyeluruh, luas dan mendalam. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik bidang tertentu. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan data yang diperoleh secara kualitatif. Teknik ini digunakan untuk mengelola data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hal 133.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah yang bersifat penemuan. Penelitian kualitatif harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan nilai terikat.

Metode penelitian kualitatif digunakan sebagai pendekatan untuk menggambarkan fenomena alamiah yang terjadi berdasarkan teori yang relevan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk memaparkan dan mendeskripsikan implementasi PKH dalam upaya pemerataan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kampung Penuntungan, Subulussalam, Aceh. Lokasi penelitian ditetapkan di Kampung Penuntungan, Subulussalam, Provinsi Aceh, yang merupakan salah satu wilayah sasaran PKH.

C. Informan Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Informan Penelitian

Informan yang digunakan pada penelitian ini adalah informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan PKH di Kampung Penutungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam. Informan pada penelitian ini sengaja di pilih (*purposive sampling*), yakni berdasarkan pertimbangan tertentu yang berkaitan langsung dengan tujuan penelitian.

Meleong (2019) mengatakan bahwa informan dalam penelitian kualitatif di pilih secara *purposive*, artinya mereka yang di anggap memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang topik penelitian.⁴⁶ Di lain sisi, Sugiyono (2017) mendefinisikan *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampel dari sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu. Misalnya, individu yang dianggap memiliki pengetahuan yang lebih tentang subjek yang di teliti atau memiliki pemahaman yang kuat tentang masalah yang diteliti.⁴⁷

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hal. 132.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 85.

Adapun informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Katagori Informan	Jumlah	Keterangan
1	Ketua RT Kampung Penuntungan	1 orang	Mengetahui kondisi sosial dan data warga di wilayah pelaksanaan PKH
2	Koordinator PKH Kecamatan Penanggalan	1 orang	Bertanggung jawab terhadap data warga dan sistematis digitalisasi program
3	Pendamping PKH Kampung Penuntung	1 orang	Bertugas mendampingi dan memantau KPM serta implementasi program di lapangan
4	Penerima PKH (KPM)	5 orang	Menerima bantuan PKH, memberikan persepektif penerima manfaat
5	Ketua Kelompok PKH	1 orang	Mengoordinasi anggota KPM dan kegiatan kelompok seperti P2K2
	Jumlah	9 orang	

Pemilihan informan pada tabel 3.1 dilakukan secara selektif untuk mewakili berbagai perspektif dari pelaksana, pendamping, dan penerima manfaat dalam pelaksanaan PKH. Peneliti hanya memilih 5 informan dari 61 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kampung Penuntungan. karena tidak ada keterbatasan data, jumlah ini dipilih. Sebaliknya, karena sifatnya yang kualitatif deskriptif, penelitian ini menekankan pada kedalaman informasi dari pada kuantitas responden.

2. Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau yang sering dikenal sebagai sampling bertujuan, yaitu teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang terkait langsung dengan tujuan penelitian. Teknik ini sering digunakan dalam pendekatan kualitatif karena mampu menghasilkan informasi secara luas dan mendalam dari informan yang memiliki pemahaman yang relevan dengan fenomena yang di kaji.⁴⁸

Informan pada Penelitian ini di pilih oleh peneliti berdasarkan kualitas pengalaman dan pengetahuan mereka tentang PKH di Kampung Penuntungan, bukan jumlah. Informan dipilih karena dianggap dapat memberikan data faktual yang diperlukan untuk penelitian. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Informan yang telah terlibat langsung dalam pelaksanaan dan penerima PKH setidaknya selama setahun terakhir.
- b. Informan yang memiliki pengalaman faktual dalam proses administrasi, pelaksanaan teknis, atau sebagai penerima manfaat.
- c. Informan yang bersedia untuk diwawancarai dan memiliki kemampuan untuk memberikan informasi secara terbuka, kritis, jujur, dan mendalam.

⁴⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hal. 132.

Metode *purposive sampling* yang digunakan pada penelitian ini memungkinkan peneliti untuk fokus pada konteks sosial lokal, memperhatikan dinamika di lapangan, dan menggali lebih mendalam terkait keberagaman pandangan dari berbagai pihak yang terlibat. Hal ini sejalan dengan pandangan Miles dan Hubnerman bahwa dalam penelitian kualitatif, kedalaman informasi lebih penting dari pada representasi statistik ketika memilih informan.⁴⁹

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang di perlukan dalam suatu penelitian yang di kenal sebagai teknik pengumpulan data. Teknik-teknik ini meliputi wawancara, kuesioner, observasi serta studi dokumentasi. Tujuan penelitian, jenis data yang di kumpulkan, dan pendekatan penelitian yang digunakan semua mempengaruhi pemilihan teknik pengumpulan data.⁵⁰ Namun, pengumpulan data-data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan lima teknik, yaitu:

1. Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif digunakan untuk memahami konteks sosial, pola interaksi, dan situasi faktual di lapangan, tahap awal dalam pengumpulan data pada penelitian ini. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk melakukan pengamatan langsung tentang fenomena-fenomena yang ada kaitannya

⁴⁹ Miles, M. B., & Hubner, A. M, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, (Thousand Oaks: Sage Publications: 1994), hal. 27.

⁵⁰ ⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 224.

dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini termasuk perilaku, ekspresi non-verbal, suasana pertemuan kelompok, dan bagaimana pendamping berinteraksi dengan PKH. Dalam observasi ini peneliti akan menjamah proses implementasi dan kendala dalam implementasi PKH yang ada di Kampung Penuntungan di Subulussalam, Aceh.

Spredley mendefinisikan observasi partisipatif merupakan suatu proses sistematis untuk mencatat perilaku dan peristiwa yang terjadi dalam lingkungan alami, dengan peneliti bertindak sebagai pengamat dan partisipan terbatas.⁵¹ Peneliti memilih menjadi partisipan moderat dalam penelitian ini, yang berarti mereka cukup terlibat dalam aktivitas sosial tanpa kehilangan status mereka sebagai peneliti yang objektif. Observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap kegiatan seperti:

- a. Pertemuan rutin kelompok PKH dengan pendamping sosial PKH setiap bulannya
- b. Proses pendataan dan validasi penerima bantuan
- c. Interaksi antara pendamping dengan KPM dan aparat desa
- d. Respons dan sikap KPM terhadap program yang dijalankan

Hasil observasi didokumentasikan dalam catatan lapangan, juga dikenal sebagai catatan lapangan, dan digunakan sebagai dasar untuk proses wawancara yang lebih mendalam. Untuk membangun kepercayaan dengan informan dan memvalidasi data melalui triangulasi, observasi juga penting.

⁵¹Spradley, James P., *Participant Observation*, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980), hal. 34.

Menurut Angrosino, observasi memiliki kemampuan untuk mengungkap perilaku yang tidak diungkapkan secara lisan dan membantu menghubungkan antara cerita dan kenyataan sosial.⁵²

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode utama yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data pada penelitian ini. Peneliti menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang fleksibel secara langsung kepada informan, memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi lebih sesuai dengan konteks dan tanggapan informan serta jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam.⁵³ Menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur, penulis perlu memegang beberapa anggapan penting. Pertama, penulis berasumsi bahwa setiap pernyataan yang disampaikan oleh subjek adalah benar dan dapat dipercaya. Kedua, penulis menganggap bahwa interpretasi subjek terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan oleh penulis.

Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kampung Penuntungan, khususnya tentang cara program dijalankan, tantangan yang dihadapi, termasuk tantangan digital, dan dampak pada kesejahteraan

⁵² Angrosino, Michael V, *Doing Ethenographic and Observational Research*, (London: Sage Publications, 2007), hal. 16.

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hal. 186.

masyarakat. Informasi ini di kumpulkan dari informan yang terlibat secara langsung dalam program dan memiliki pengalaman sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), selanjutnya penulis dapat menjabarkan lebih luas informasi tersebut melalui pengolahan data secara komprehensif.⁵⁴ Informan yang akan diwawancarai sebanyak 9 (sembilan) orang yang masing-masing terdiri dari 1 (satu) orang ketua RT Kampung Penuntungan, 1 (satu) orang petugas pengolah data desa bagian komputer di kantor desa , 1 (satu) orang pendamping PKH di Kampung Penuntungan dari Dinas Sosial, 1 (satu) orang ketua kelompok PKH dan 5 (lima) orang KPM PKH.

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian, yaitu:

- a. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kampung Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam ?
- b. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kampung Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam ?
- c. Bagaimana dampak Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kampung Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam?

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), hal. 137.

Berikut merupakan daftar pertanyaan kunci yang akan di ajukan kepada informan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan akurat, khususnya kepada para KPM. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kunci sebagai berikut:

- a. Sejak kapan Bapak/Ibu menerima bantuan PKH dan bagaimana proses awalnya hingga bisa terdaftar?
- b. Bagaimana pengalaman Bapak/Ibu selama menerima bantuan PKH? Apakah pencairan dana berjalan lancar?
- c. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami kendala dalam menerima bantuan, seperti keterlambatan atau masalah teknis lainnya?
- d. Apakah Bapak/Ibu merasa kesulitan dalam penggunaan sistem digital, seperti HP, aplikasi atau sistem digital dalam proses PKH? Jika iya, bagaimana bentuknya?
- e. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan pendampingan atau sosialisasi terkait penggunaan aplikasi atau sistem digital dalam proses PKH? Jika iya, bagaimana bentuknya?
- f. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu terhadap sikap, pelayanan, dan kehadiran pendamping PKH di kampung ini?
- g. Apakah bantuan PKH membantu Bapak/Ibu dalam hal pendidikan anak, kesehatan keluarga, dan kebutuhan sehari-hari?
- h. Menurut Bapak/Ibu apakah penerima PKH di kampung ini sudah tepat sasaran?

- i. Apakah ada keluarga atau tetangga yang menurut Bapak/Ibu lebih layak menerima bantuan, tetapi belum terdaftar? Bagaimana tanggapannya?
- j. Apa harapan atau saran Bapak/Ibu agar pelaksanaan PKH, termasuk penggunaan sistem digital, bisa berjalan lebih baik ke depannya?

Teknik wawancara semi-terstruktur digunakan oleh peneliti pada penelitian ini, agar peneliti dapat memperoleh data yang bersifat naratif dan kontekstual yang menggambarkan pengalaman, tantangan, serta harapan masyarakat yang terlibat dalam PKH di Kampung Penuntungan.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan kajian dokumentasi yaitu memperoleh informasi/data sekunder dengan cara mengambil foto-foto, mempelajari literatur, referensi, buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 13 Tahun, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015, Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Sosial No. 10 Tahun 2017.⁵⁵

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), hal. 62.

4. Kunjungan Rumah (*Home Visit*)

Kunjungan rumah merupakan hal penting pada pendekatan penelitian sosial ini, yang di mana hal tersebut memungkinkan peneliti memahami kondisi nyata subjek di lingkungan tempat informan tinggal. Dengan melakukan kunjungan ke rumah beberapa KPM, peneliti dapat melihat secara langsung bagaimana situasi kehidupan KPM, seperti kondisi rumah, jumlah tanggungan, dan pola asuh.

Kunjungan rumah merupakan teknik yang sangat membantu peneliti untuk memahami makna sosial yang mungkin tidak tampak dalam forum formal seperti wawancara atau pertemuan kelompok.⁵⁶ Selain itu, teknik kunjungan rumah juga membantu peneliti dengan informan untuk membangun hubungan yang dapat di percaya, yang sangat penting untuk mengumpulkan data kualitatif.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola. Analisis data kualitatif terdiri atas kata-kata bukan angka-angka. Kata sering hanya mengandung makna dalam konteks kata itu digunakan. Untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti menggunakan metode deskripsi analisis, yaitu menggambarkan dan menjabarkan secara jelas mengenai objek penelitian sesuai

⁵⁶ Patton, Michael quinn. *Qualitative Research & EvaluationnnMethods*, 3rd ed, (Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2002), hal. 341.

dengan fakta yang ada di lapangan. Setelah itu data dirangkum, memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan pada hal-hal yang penting. Kemudian data disajikan sehingga memudahkan untuk merencanakan kerja selanjutnya. Langkah berikutnya data dianalisis dan ditarik kesimpulan.⁵⁷

Peraturan Presiden nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai merupakan acuan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, di mana peraturan Presiden tersebut menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan sosial. Hal ini ditujukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan sosial serta mewujudkan prinsip 4T (Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Administrasi) dan mendorong keuangan inklusif Presiden Republik Indonesia memberikan arahan agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai.⁵⁸

⁵⁷ Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah*, vol. 17, no. 33, 2018.

⁵⁸ Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 mengatur bahwa penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan Sosial. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan sosial serta mewujudkan prinsip 4T (Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Administrasi).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Kondisi Wilayah dan Demografi Kampung Penuntungan

Kampung Penuntungan merupakan salah kampung yang secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh.⁵⁹ Kampung ini memiliki pemerintahan kampung sendiri yang di pimpin oleh kepala kampung atau yang di sebut sebagai Rukun Tetangga (RT), dan bertanggung jawab atas urusan lokal sesuai dengan peraturan daerah, karena berada dalam struktur pemerintahan tingkat bawah.⁶⁰

Kampung Penuntungan memiliki luas sekitar 17,06 km², Yang di mana ini merupakan wilayah yang cukup luas dibandingkan dengan wilayah kampung lain yang berada di Kecamatan Penanggalan. Secara geografis, kampung ini berbatasan langsung dengan Kampung Cepu di sebelah barat, Lae Bersih di sebelah utara, Tangga Besi di timur laut , dan wilayah Jontor di sebelah selatan.⁶¹

⁵⁹ <https://kampunskb.kkbkn.go.id/kampung/52182/penuntungan>

⁶⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

⁶¹ Pemerintah Kampung Penuntungan, *Peta Administratif Kampung Penuntungan*, Kantor Kepala Kampung Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, 2024.

Kondisi topografi di wilayah Kampung Penuntungan di dominasi oleh perbukitan dengan beberapa aliran sungai yang membelah kawasan, sehingga selain memberikan potensi sumber air bagi masyarakat untuk kebutuhan berkebun dan kebutuhan sehari-hari. Masyarakat setempat pun menjadikan sumber air ini sebagai bagian dari identitas dan potensi wisata lokal melalui daya tarik seperti panorama alam dan *spot* wisata tersembunyi. Bahkan, kawasan ini dikenal sebagai lokasi menarik layaknya “*Grand Canyon Penuntungan*”, yang menambah nilai estetika sekaligus peluang pengembangan wisata lokal.⁶² Karena letak geografis Kampung Penuntungan yang berbukit, dengan kontur wilayah yang bergelombang dan tidak rata, topografi ini berpotensi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat terutama pada pola pemukiman dan fasilitas umum yang cenderung berada di tempat yang lebih datar atau di lereng yang tidak terlalu curam.

Kampung Penuntungan memiliki jarak yang lumayan cukup dekat dengan pusat kota dan kecamatan bila di akses dengan kendaraan seperti kendaraan roda dua atau roda empat. Dengan jarak tempuh sekitar 4,7 Km dari Kampung Penuntungan menuju ke Ibu Kota Kecamatan Penanggalan, dan sekitar 11 Km ke pusat Ibu Kota Subulussalam, masyarakat Kampung Penuntungan dapat dengan mudah dan cepat mengakses berbagai layanan pemerintah seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan dan pasar.

⁶² Hasil observasi lapangan dan wawancara dengan aparat Kampung Penuntungan serta masyarakat setempat, Kampung Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, tahun penelitian.

Secara administratif Kampung Penuntungan ini terdiri dari 9 Rukun Tetangga (RT) dan 4 dusun, yaitu Dusun Sejahtera, Dusun Benteng Sari, Dusun Namo Sempuren, dan Dusun Air Terjun. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2024 mencapai 1.751 jiwa dengan perbandingan 869 laki-laki dan 882 perempuan, dengan total 345 kepala Keluarga (KK).⁶³ Jumlah KK pada setiap dusun di Kampung Penuntungan dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 jumlah KK di Hitung pada Setiap Dusun Kampung Penuntungan

No.	Nama Dusun	RT di Setiap Dusun	Jumlah KK
1	Dusun Sejahtera	RT 01 dan RT 09	84 KK
2	Dusun Benteng Sari	RT 02 RT 03	72 KK
3	Dusun Namo Sempuren	RT 04 RT 07	101 KK
4	Dusun Air Terjun	RT 05, RT 06, dan RT 08	88 KK
Total		-	345 KK

Sumber: Data Kantor Kepala Kampung Penuntungan, 2024

Tabel 4.1 di atas merupakan jumlah KK yang dihitung secara per dusun yang di mana jumlah KK setiap dusunnya akan di jumlahkan dan menjadilah total keseluruhan jumlah KK di Kampung Penuntungan. Kepadatan penduduk di kampung Penuntungan di perkirakan sekitar 186 jiwa per Km² dengan rata-rata 5-6 orang per rumah tangga.

⁶³ Pemerintah Kampung Penuntungan, *Data Kependudukan Kampung Penuntungan Tahun 2024*, Kantor Kepala Kampung Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam.

Keberadaan berbagai fasilitas merupakan bagian penting dalam mendukung aktivitas masyarakat di Kampung Penuntungan, fasilitas yang tersedia di Kampung Penuntungan cukup beragam dan mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Rincian mengenai jenis serta jumlah fasilitas yang tersedia dapat dilihat pada Tabel 4.2, yang disusun berdasarkan data Peta Kampung Penuntungan dan hasil observasi lapangan.

Tabel 4.2 Fasilitas Kampung Penuntungan

No.	Jenis Fasilitas	Nama/Deskripsi	Jumlah
1	Fasilitas Keagamaan	Masjid An-Nur	1 Masjid
		Musholla Al-Huda, Al-Ikhlas, Baiturrahman, Al-ANSOR, Jabal Rahman, Nurul Ihsan	6 Musholla
2	Fasilitas Pendidikan	SDN 1 Penuntungan	1 SD
		TK Muhammadiyah	1 TK
3	Fasilitas Kesehatan	PUSKESDES (Pusat Kesehatan Desa)	1 PUSKESDES
4	Infrastruktur Jalan & Jembatan	Jalan utama	1 jalan utama
		Jembatan penghubung	2 jembatan
5	Fasilitas Umum Lainnya	Lapangan bola dan lapangan voli	2 lapangan
		TPA (Tempat Pendidikan Al-Qur'an)	1 TPA
		Perpustakaan Kampung	1 perpustakaan
		TPU (Tempat Pemakaman Umum)	1 TPU
		Tower telekomunikasi	1 tower

Sumber: Peta Kampung Penuntungan dan hasil observasi

Tabel 4.2 di atas dapat dipahami bahwa fasilitas di Kampung Penuntungan sudah cukup memadai untuk ukuran kampung dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kampung. Dari sisi keagamaan, masjid terletak di tengah kampung sehingga masjid ini menjadi sangat strategis bagi masyarakat kampung untuk melakukan perkumpulan besar bersama seperti acara besar hari raya dan Shalat Aid hari raya, di setiap dusun memiliki musholla yang memudahkan masyarakat dalam beribadah, hal ini sudah termasuk cukup dalam fasilitas keagamaan.

Keberadaan bidang pendidikan seperti Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) di pusat desa memudahkan anak-anak untuk menempuh pendidikan sampai SD saja, untuk melanjutkan pendidikan ke SMP dan SMA anak-anak Kampung Penuntungan harus melanjutkan pendidikan di pusat kecamatan atau di luar Kampung Penuntungan. Hal ini, membutuhkan biaya tambahan transportasi yang dikarenakan jarak tempuh ke SMP dan SMA tidak dekat dari Kampung Penuntungan yang menimbulkan tantangan bagi keluarga dengan ekonomi terbatas. Hal ini berpotensi memengaruhi tingkat partisipasi pendidikan menengah ke atas.

Ibu GY yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang juga menerima PKH menyampaikan keluhan terkait keterbatasan fasilitas pendidikan di Kampung Penuntungan. ia menjelaskan bahwa ketiga anaknya bersekolah di jenjang yang berbeda dengan lokasi yang terpisah:

“Anak saya tiga orang, yang kecil masih kelas 3 SD di SDN 1 Penuntungan. anak kedua sudah kelas 2 SMP di Kecamatan Penanggalan, dan anak saya yang pertama baru masuk SMA di MAN 1 Kota Subulussalam. Setiap pagi kami selalu ribut masalah kendaraan, karena hanya ada dua motor; satu dipakai suami untuk ke ladang dan satunya saya pakai untuk pergi bekerja. Akhirnya antar jemput anak sekolah jadi repot sekali. Biaya transportasi juga makin besar karena jarak sekolah yang jauh.”⁶⁴

Keberadaan bidang kesehatan berupa Pusat Kesehatan Desa (PUSKESDES) hadir sebagai fasilitas penting untuk layanan kesehatan dasar. Akan tetapi, keterbatasan tenaga medis dan ketiadaan sarana darurat seperti ambulans kampung membuat masyarakat segera di rujuk ke pusat kesehatan kecamatan atau rumah sakit di Kota Subulussalam menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan milik tetangga untuk kasus yang lebih serius.

Fasilitas infrastruktur di Kampung Penuntungan, khususnya jalan utama dan jembatan, telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam menunjang mobilitas penduduk. Infrastruktur tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penghubung internal antar dusun dan kampung, tetapi juga sebagai akses utama yang menghubungkan Kampung Penuntungan dengan kampung-kampung sekitar, pusat Kecamatan Penanggalan, serta pusat Kota Subulussalam. Terdapat beberapa jalan penghubung antara dusun yang

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu GY sebagai KPM PKH di Kampung Penuntungan pada tanggal 15 Juli 2025

menggunakan material kerikil atau cor blok, sehingga memungkinkan kendaraan roda dua maupun roda empat melintas dengan lancar. Dengan adanya jalan dan jembatan ini, aktivitas sehari-hari seperti transportasi, perdagangan, pendidikan, dan pelayanan publik dapat berjalan lancar, sehingga mempermudah masyarakat dalam melakukan interaksi sosial, ekonomi, dan administratif kampung lainnya.

Fasilitas umum lainnya, seperti lapangan olahraga, TPA, dan TPU, menunjukkan adanya perhatian terhadap kebutuhan sosial dan keagamaan. Tower telekomunikasi juga hadir sebagai penunjang komunikasi, meskipun jangkauannya belum sepenuhnya merata sehingga sebagian wilayah masih mengalami gangguan jaringan, khususnya pada daerah perkebunan dan daerah yang jauh dari wilayah tower telekomunikasi terletak.⁶⁵

Secara keseluruhan, fasilitas di Kampung Penuntungan sudah mendukung aktivitas sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan masyarakat. Tetapi masih terdapat keterbatasan yang perlu ditingkatkan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih menyeluruh.

2. Kondisi Sosial dan Ekonomi Kampung Penuntungan

Masyarakat Kampung Penuntungan menjadikan sektor perkebunan kelapa sawit sebagai sumber utama mata pencaharian. Sebagian besar keluarga memiliki kebun sawit dengan skala kecil yang diolah secara mandiri, sementara sebagian lainnya bekerja sebagai buruh panen, buruh perawatan

⁶⁵ Pemerintah Kampung Penuntungan, *Peta Administratif Kampung Penuntungan*, Kantor Kepala Kampung Penuntungan; dan hasil observasi lapangan peneliti di Kampung Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, 29 Juni 2025.

kebun, maupun pengangkut Tandan Buah Segar (TBS) milik pemilik kebun. Selain menjual TBS sawit, warga juga memanfaatkan pelepah sawit untuk di jadikan lidi yang kemudian di jual kepada pengepul sebagai tambahan penghasilan. Ketergantungan penuh pada sawit membuat perekonomian masyarakat sangat rentan terhadap ketidakstabilan harga sawit. Harga TBS sawit yang tidak stabil sering kali menimbulkan dampak serius terhadap daya beli keluarga. Bapak Samsul Berutu sebagai Ketua RT Kampung Penuntungan menyampaikan :

“Masyarakat disini hampir semuanya hanya bergantung pada kebun sawit. Mulai dari pemilik kebun sawit, buruh kebun sawit, agen sawit, ya pokoknya hampir rata-rata bergantung pada kebun sawit. Kalau harga sawit naik, ekonomi keluarga membaik dan bisa lebih longgar, tapi kalau turun, kondisi ekonomi rumah tangga langsung tertekan dan terasa susah sekali, yang paling merasakan kalo harga turun itu ya buruh kebun sawit. Karena kalo sudah sawit turun harga, para pemilik kebun jarang sekali menyerahkannya pada orang lain atau buruh untuk memanen buah sawit jadi para pekerja buruh sawit terasa susah sekali.”⁶⁶

Pemanfaatan lahan pekarangan rumah juga dilakukan oleh beberapa keluarga untuk kegiatan hortikultura skala rumah tangga selain sawit. Aktivitas ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, tetapi juga membuka peluang pendapatan tambahan melalui penjualan hasil produksi dalam jumlah terbatas. Kontribusi ekonominya memang tidak sebesar komoditas sawit, namun praktik hortikultura tetap

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Samsul Berutu sebagai Ketua RT Kampung Penuntungan pada tanggal 7 Juli 2025

memberikan manfaat nyata bagi ketahanan pangan keluarga, praktik hortikultura ini membantu keluarga mengurangi ketergantungan sepenuhnya pada ketidakstabilan harga TBS sawit. Bapak Handono yang merupakan warga Kampung Penuntungan menjelaskan :

*“kami menanam beberapa tanaman hortikultura di pekarangan untuk kebutuhan rumah tangga kadang hasilnya bisa dijual ke tetangga atau pasar lokal. Tidak banyak, tetapi cukup membantu kebutuhan sehari-hari ya hitung-hitung untuk jajan anak lah, soalnya tidak banyak.”*⁶⁷

Struktur mata pencaharian masyarakat Kampung Penuntungan menunjukkan keragaman jenis pekerjaan yang dijalani oleh penduduk dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Komposisi tersebut mencerminkan dominasi sektor pertanian dan perkebunan sebagai sumber penghidupan utama, disertai dengan keberadaan pekerjaan lain seperti buruh harian, pedagang kecil, pegawai negeri maupun swasta, serta berbagai jenis pekerjaan informal lainnya. Gambaran mengenai distribusi mata pencaharian tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.3, sedangkan visualisasinya disajikan melalui Diagram 4.1 untuk memperjelas struktur ekonomi penduduk Kampung Penuntungan:

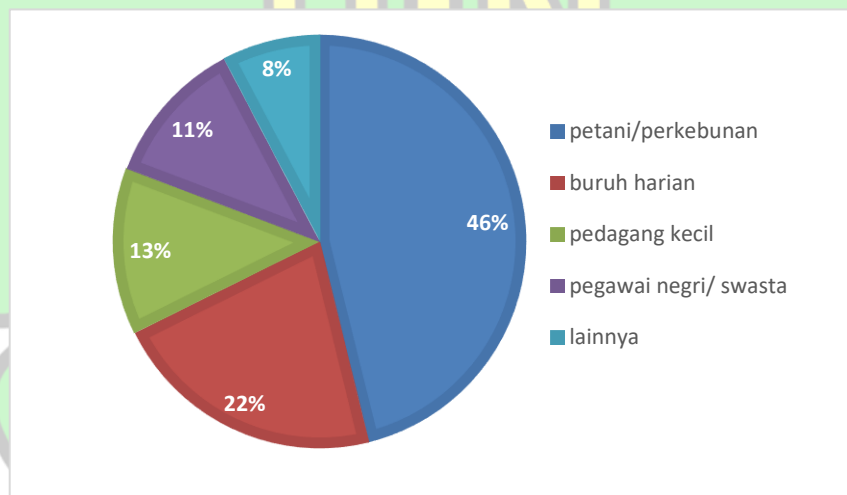
⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Handono sebagai Warga Kampung Penuntungan pada tanggal 23 Juli 2025

**Tabel 4.3 Distribusi Mata Pencaharian Masyarakat
Kampung Penuntungan**

No.	Jenis Pekerjaan	Perentase (%)
1.	Petani/Perkebunan	46%
2.	Buruh Harian	22%
3.	Pedagang Kecil	13%
4.	Pegawai Negri/ Swasta	11%
5.	Lainnya	8%

Sumber: Olahan data penelitian 2025

**Diagram 4.1 Distribusi Mata Pencaharian Masyarakat
Kampung Penuntungan**



Berdasarkan tabel 4.3 dan diagram 4.1 dapat dilihat bahwa petani/perkebunan sawit lebih mendominasi mata pencaharian warga dengan persentase 46%. Sementara itu, 22% bekerja sebagai buruh harian di kebun sawit milik orang lain, 13% berdagang kecil-kecilan, 11% bekerja sebagai pegawai negeri/swasta dan 8% lainnya bekerja pada sektor lain. Data ini menunjukkan bahwa hampir tiga per empat penduduk (68%) sepenuhnya bergantung pada komoditas sawit, baik sebagai pemilik kebun maupun buruh

yang bekerja pada perkebunan. Struktur ekonomi yang timpang ini menjadikan masyarakat sangat rentan terhadap gejolak harga sawit pasar. Ketika harga turun, sebagian keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, termasuk biaya pendidikan anak dan kebutuhan kesehatan.

Kondisi ini berimplikasi pada tingginya jumlah keluarga miskin di Kampung Penuntungan ; dari total 302 KK, sebanyak 125 KK di kategorikan sebagai keluarga tidak mampu, dan 61 KK di antaranya menjadi penerima manfaat PKH pada tahun 2025. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi sebagian besar penerima PKH bekerja sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit. Fakta ini menegaskan bahwa kemiskinan di kampung ini bersifat struktural, karena tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga terbatasnya alternatif mata pencaharian selain perkebunan kelapa sawit.⁶⁸

3. Gambaran Umum Kondisi KPM PKH Kampung Penuntungan

Mayoritas keluarga penerima bantuan PKH di Kampung Penuntungan masuk pada kategori desil 1 (satu) hingga desil 4 (empat) yaitu pada katagori desil 1 yang merupakan miskin ekstrem, desil 2 miskin, desil 3 rentan miskin, dan desil 4 menengah ke bawah. Klasifikasi ini didasarkan pada data kesejahteraan yang memotret pendapatan, aset, dan kondisi rumah tangga. Pada kategori menengah ke bawah (desil 4), dengan pendapatan keluarga yang berada di bawah Rp 1 juta per bulan.⁶⁹

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Suparman selaku pendamping PKH Kampung Penuntungan pada tanggal 7 juli 2025

⁶⁹ Dinas Sosial Kota Subulussalam, *Data Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Subulussalam*, Kota Subulussalam: Dinas Sosial Kota Subulussalam, 2025.

Hasil wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar kepala keluarga bekerja pada sektor informal, seperti buruh harian, petani lahan kecil, pekerja serabutan, serta pedagang kecil. Pendapatan mereka bersifat tidak tetap, bergantung pada musim dan kesempatan kerja. Risiko kerentanan ekonomi cukup tinggi, yang berdampak langsung pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan gizi anak. Pendidikan kepala keluarga rata-rata rendah, banyak yang hanya menamatkan SD atau SMP, sehingga akses mereka terhadap pekerjaan yang lebih stabil juga terbatas.

Pendamping PKH menjelaskan bahwa sebagian besar KPM di kampung ini menerima bantuan karena memiliki komponen kesehatan dan pendidikan, seperti ibu hamil, balita, serta anak usia sekolah:

“Kebanyakan penerima di sini meliputi komponen pendidikan dan kesehatan. Jadi ada anak sekolah, ibu hamil, atau balita. Dana banyak dipakai buat gizi dan perlengkapan sekolah karna memang untuk anak sekolah ini terlalu banyak dana yang harus di keluarkan.”⁷⁰

Bantuan PKH Sebagian besar digunakan oleh KPM untuk kebutuhan anak dan kesehatan, terutama perlengkapan sekolah, makanan bergizi, dan biaya transportasi ke fasilitas kesehatan dan ke fasilitas pendidikan. Dana ini sangat membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan anak yang rutin muncul setiap tahun ajaran baru, seperti seragam, buku, dan perlengkapan sekolah lainnya yang di mana ini merupakan beban bagi keluarga yang berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak tersebut.

⁷⁰Wawancara dengan Bapak Suparman selaku pendamping PKH Kampung Penuntungan pada tanggal 7 juli 2025

“biasanya kalo sudah cair uang PKH, Ibu gunakan untuk kebutuhan yang terpenting kayak kebutuhan sekolah anak beli seragam sekolah, buku, sepatu, susu, dan kadang untuk berobat kalau anak panas, tapi kalau dilihat dari kebutuhan yang sering di gunakan dari pencairan uang PKH ini ya untuk kebutuhan anak sekolah karna setiap ajaran baru ada saja pengeluaran untuk kebutuhan sekolah ini, walaupun sekolah sekarang negri tidak berbayar tapi untuk keperluannya seperti buku, sepatu itu kita yang sediakan ya dari uamng PKH tadi.”⁷¹

Beberapa KPM menyampaikan bahwa keberadaan pendamping PKH memberikan bantuan yang sangat berarti, khususnya ketika terjadi perubahan kebijakan atau pembaruan data. Mereka merasa terbantu karena pendamping selalu memberikan penjelasan yang mudah dipahami, mengingat banyak dari mereka yang mengalami kesulitan ketika harus memahami informasi melalui aplikasi. Para KPM juga mengungkapkan bahwa meskipun nominal bantuan tidak terlalu besar, bantuan tersebut tetap memberikan dampak yang signifikan dalam meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Bantuan PKH sangat membantu terutama dalam memenuhi kebutuhan sekolah anak serta kebutuhan dasar balita. Tanpa adanya PKH, beberapa KPM mengaku akan kesulitan memenuhi kebutuhan tersebut.

⁷¹ Wawancara dengan Ibu IS sebagai KPM PKH di Kampung Penuntungan pada tanggal 15 juli 2025.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian ini diperoleh melalui observasi lapangan serta wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan PKH di Kampung Penuntungan. Informasi dikumpulkan dari pendamping PKH Kampung Penuntungan, aparatur kampung, koordinator PKH Kecamatan Penanggalan, dan beberapa KPM. Selain itu, data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara diperkuat dengan dokumen resmi dari Dinas Sosial Kota Subulussalam serta arsip pelaksanaan PKH yang dikelola oleh pendamping dan koordinator PKH setempat. Berbagai sumber data tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual pelaksanaan program di tingkat kampung.

Bagian ini menyajikan hasil penelitian lapangan yang kemudian dianalisis dan dibahas untuk menjelaskan tiga aspek utama, yaitu: (1) implementasi PKH di Kampung Penuntungan, (2) Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PKH di Kampung Penuntungan, serta (3) Dampak PKH terhadap kesejahteraan masyarakat kampung Penuntungan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana kebijakan PKH diterapkan di lapangan, bagaimana profil dan dinamika keluarga penerima manfaat, serta bagaimana program ini berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Temuan-temuan pada bagian berikutnya disusun untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keberhasilan, hambatan, serta dampak sosial ekonomi dari pelaksanaan PKH di Kampung Penuntungan.

1. Implementasi PKH di Kampung Penuntungan

Implementasi PKH di Kampung Penuntungan ini berfokus pada bagaimana PKH dilaksanakan di Kampung Penuntungan, mulai dari proses pendampingan, mekanisme penyaluran bantuan, hingga perubahan sistem pendataan yang mempengaruhi kelayakan penerima. Selain menjelaskan kegiatan yang dilakukan pendamping di lapangan, bagian ini juga menguraikan apakah implementasi PKH sudah berjalan sesuai regulasi nasional.

Pelaksanaan PKH di Kampung Penuntungan berjalan melalui proses pendampingan yang dilakukan oleh dua orang pendamping, yaitu Suparman dan Aris Purba. Pendamping Suparman telah bertugas sejak tahun 2018 dengan riwayat penempatan di beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Singkil Utara (2 tahun), Kecamatan Danau Paris (1 tahun), Kecamatan Simpang Kiri (1 tahun), dan sejak dua tahun terakhir ditugaskan di Kecamatan Penanggalan. Dalam wilayah ini, ia mendampingi enam kampung, yaitu Kampung Penuntungan, Lae Bersih, Kampung Baru, Kampung Cepu, Kuta Tengah, dan Lae Ikan.

Suparman menjelaskan bahwa perpindahan wilayah tugas merupakan kebijakan untuk “penyegaran” dan peningkatan pengalaman pendamping. Sementara itu, rekannya, Aris Purba, merupakan pendamping lokal yang berasal dari Kampung Penuntungan.⁷²

⁷² Wawancara dengan Bapak Suparman selaku pendamping PKH Kampung Penuntungan pada tanggal 7 juli 2025

Jumlah KPM PKH di Kampung Penuntungan saat penelitian berlangsung tercatat sebanyak 61 KPM.⁷³ dengan jumlah 61 KPM pendamping PKH membagi ke dalam tiga kelompok P2K2 untuk memudahkan pendampingan saat melakukan pertemuan rutin P2K2 setiap bulannya.

a. Mekanisme Penyaluran dan Pendampingan

Mekanisme penyaluran PKH di Kampung Penuntungan pada dasarnya mengikuti mekanisme nasional, yaitu penyaluran bantuan secara triwulanan atau empat kali dalam setahun. Pada saat penelitian dilakukan pada bulan Juli, proses pencairan telah memasuki dua tahap, yakni tahap pertama pada Januari hingga Maret dan tahap kedua pada April hingga Juni. Meskipun demikian, pelaksanaan penyaluran di tingkat kampung tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Baik KPM maupun pendamping kerap menghadapi kendala, terutama sejak pencairan dana PKH dapat dilakukan secara mandiri oleh KPM. Pendamping PKH, Bapak Suparman, menjelaskan bahwa sebenarnya KPM sudah memiliki beberapa pilihan untuk mengecek status pencairan dana. Ia menyampaikan:

“KPM sekarang sudah bisa mengecek sendiri apakah dana PKH ini sudah masuk apa belum. Mereka bisa melihat langsung melalui aplikasi Cekbansos, atau kalau mereka punya ATM yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bisa dicek langsung ke ATM atau e-warong, bisa juga langsung ke Bank-nya. Atau mereka bisa tanyakan ke pendamping atau operator Dinas Sosial, nanti kami mengecek di aplikasi yang namanya SIKS-NG yang di mana aplikasi ini hanya dipegang oleh kami saja, tidak oleh KPM.”⁷⁴

⁷³ Hasil wawancara dengan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, tahun penelitian.

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Suparman selaku pendamping PKH Kampung Penuntungan pada tanggal 7 Juli 2025

Pernyataan tersebut disampaikan oleh pendamping PKH dan diamati langsung oleh peneliti ketika kegiatan pertemuan P2K2 dilaksanakan pada bulan Juli. Pada saat itu, sebagian KPM tampak belum mengetahui apakah dana bantuannya sudah masuk atau belum. Hal ini juga diungkapkan oleh salah seorang penerima PKH yaitu Ibu BR ketika pendamping menanyakan status pencairan:

“Saya belum tau pun uangnya sudah masuk apa belum. Saya belum sempat pergi ke ATM untuk ngecek melalui Kartu KKS itu. Terus, setiap saya ada waktu, saya tidak ada kendaraan untuk pergi mengecek saldo. Ngecek di HP di Cek Bansos kadang pas teringan paket internetnya gak ada, terus memang jarang paket internet di HP saya ada karena paket internet ini mahal-mahal.”⁷⁵

Keterangan tersebut menggambarkan kendala utama yang dialami KPM di Kampung Penuntungan, yaitu kesulitan dalam melakukan pengecekan pencairan dana PKH. Meskipun tersedia dua metode, yaitu melalui pengecekan saldo menggunakan KKS atau aplikasi Cek Bansos, banyak KPM tidak memiliki akses internet yang memadai atau tidak terbiasa mengoperasikan aplikasi digital tersebut. Akibatnya, KPM lebih sering harus melakukan pengecekan secara langsung di ATM atau e-warong. Namun, kondisi geografis kampung menyebabkan KPM menghadapi hambatan tambahan.⁷⁶

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu BR sebagai KPM PKH di Kampung Penuntungan pada tanggal 15 Juli 2025

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Suparman selaku pendamping PKH Kampung Penuntungan, terkait informasi pencairan dana PKH, pada tanggal 7 Juli 2025

Kampung Penuntungan tidak tersedia fasilitas ATM untuk KPM melakukan pengecekan secara langsung di ATM yang di mana ini merupakan penyebab terhambatnya pelaksanaan PKH di Kampung Penuntungan, sementara jarak menuju ATM terdekat di pusat kota Subulussalam cukup jauh. Banyak KPM tidak memiliki kendaraan pribadi sehingga harus menumpang atau membayar orang lain untuk pergi ke kota.⁷⁷ Sementara itu, aplikasi SIKS-NG yang sebenarnya memiliki informasi paling lengkap mengenai status pencairan tidak dapat diakses oleh KPM karena aplikasi tersebut hanya diperuntukkan bagi pendamping dan Dinas Sosial. Akibatnya, KPM sering terlambat mengetahui informasi pencairan dan harus menunggu penjelasan dari pendamping.⁷⁸

Kendala transportasi juga semakin terasa karena di kampung maupun kota belum tersedia layanan ojek, baik *online* maupun *offline*, kecuali transportasi becak. Kesulitan tersebut semakin jelas dalam pengalaman para KPM sendiri. Salah seorang KPM, Ibu EY, menceritakan:

*“Kalau mau cek uang PKH, saya harus ke kota. Jaraknya lumayan jauh, ongkosnya juga tidak sedikit. Pernah sudah saya datang jauh-jauh, ternyata uangnya belum masuk. Jadi pulang begitu saja, rugi waktu dan biaya.”*⁷⁹

⁷⁷Hasil observasi lapangan dan wawancara dengan informan penelitian di Kampung Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, pada tanggal 1-20 Juli 2025.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Suparman selaku pendamping PKH Kampung Penuntungan, terkait informasi pencairan dana PKH, pada tanggal 7 Juli 2025.

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu EY sebagai KPM PKH di Kampung Penuntungan pada tanggal 15 juli 2025.

Pengalaman tersebut menunjukkan adanya beban tambahan berupa waktu, tenaga, dan biaya yang harus ditanggung KPM hanya untuk memastikan apakah dana bantuan telah cair. Permasalahan serupa juga diakui oleh pendamping PKH. Mereka menuturkan bahwa ketidakpastian waktu masuknya dana sering membuat KPM bolak-balik ke kota tanpa hasil. Bapak Suparman yang merupakan seorang pendamping mengatakan:

“Kami selalu memberitahukan kalau ada informasi resmi pencairan, tetapi karena sistem masuknya dana tidak serentak, banyak KPM yang lebih dulu pergi mengecek sendiri. Kadang mereka kecewa karena uangnya belum masuk, padahal ongkos sudah keluar.”⁸⁰

Selain jarak dan biaya, beberapa KPM juga mengalami kesulitan dalam mengoperasikan mesin ATM, baik karena keterbatasan pemahaman terhadap instruksi maupun rasa takut melakukan kesalahan. Sebagian bahkan memilih meminta bantuan orang lain, yang tentu berisiko terhadap keamanan PIN dan kerahasiaan rekening. Untuk mengurangi hambatan tersebut, pendamping PKH secara rutin menyelenggarakan pertemuan bulanan P2K2 dengan membagi 61 KPM ke dalam tiga kelompok.

Kegiatan rutin pada pertemuan P2K2 pendamping selalu menanyakan apakah KPM sudah melakukan pencairan dana PKH, pada pertemuan ini juga pendamping selalu membantu KPM yang mengalami kendala pengecekan, serta memberikan penjelasan terkait informasi terbaru. Pendamping juga

⁸⁰ Wawancara dengan Bapak Suparman selaku pendamping PKH Kampung Penuntungan pada tanggal 7 Juli 2025

menyampaikan materi edukatif dari Kementerian Sosial, seperti kesehatan, pencegahan stunting, pengasuhan anak, peran orang tua, dan perencanaan ekonomi keluarga bukan hanya itu pendamping juga selalu menjelaskan tentang pencairan dana PKH. Pendamping menuturkan:

“Di P2K2 kami jelaskan lagi soal pencairan dana PKH dan kapan biasanya dana masuk. Kami juga membantu KPM yang kesulitan, terutama ibu-ibu lansia. Walaupun begitu, tetap saja mereka berharap ada cara yang lebih mudah untuk mengetahui apakah bantuan sudah cair.”⁸¹

KPM mengakui bahwa materi P2K2 bermanfaat, terutama terkait pengetahuan tentang pencairan PKH, kesehatan, dan pola pengasuhan. Namun, mereka tetap berharap adanya mekanisme pengecekan bantuan yang lebih mudah diakses tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hambatan utama dalam mekanisme penyaluran PKH di Kampung Penuntungan tidak hanya terkait kemampuan KPM menggunakan teknologi digital, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan akses geografis dan ketidakpastian informasi pencairan yang masih menyulitkan sebagian besar penerima manfaat.⁸²

⁸¹ Wawancara dengan Bapak Suparman selaku pendamping PKH Kampung Penuntungan pada tanggal 7 juli 2025

⁸² Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pendamping PKH dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada saat pertemuan P2K2 di Kampung Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, 10 Juli 2025.

b. Perubahan Sistem Pendataan

Salah satu perubahan terbesar dalam pelaksanaan PKH tahun 2024-2025 adalah peralihan data dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) menuju DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional). Suparman menjelaskan bahwa DTSEN merupakan data terbuka lintas kementerian dan lembaga sehingga lebih efisien untuk meminimalkan kesalahan sasaran.

“Dulu DTKS hanya punya Kemensos. Sekarang DTSEN lebih terbuka, lebih efisien. Sejak perubahan sistem ini banyak yang terhapus dari data karena ditemukan sudah tidak layak, sekitar 1,8 juta se-Indonesia.”⁸³

Pendamping menjelaskan bahwa proses pembaruan data dilakukan secara ketat pada awal tahun, termasuk survei lapangan dan verifikasi aset. Hal ini dilakukan karena banyak warga yang tidak jujur saat pendataan, menganggap survei sebagai jalan untuk mendapatkan bantuan baru.

Penetapan kelayakan KPM didasarkan pada klasifikasi desil kesejahteraan merupakan mekanisme terbaru. Pendekatan ini memanfaatkan peningkatan kesejahteraan rumah tangga secara bertingkat untuk memastikan bahwa bantuan sosial dialokasikan secara lebih tepat sasaran.⁸⁴ Dengan menggunakan desil sebagai rujukan, pemerintah dapat mengidentifikasi kelompok penduduk dengan kondisi paling rentan khususnya mereka yang berada pada desil 1 atau desil terbawah dengan

⁸³ Wawancara dengan Bapak Suparman selaku pendamping PKH Kampung Penuntungan pada tanggal 7 Juli 2025.

⁸⁴ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, Jakarta: Kemensos RI, 2021.

jumlah pendapatan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai pada desil 4 atau desil menengah bawah dengan pendapatan Rp1.000.0000 (satu juta ribu rupiah) ke bawah sehingga proses penetapan penerima manfaat menjadi lebih objektif, terukur, dan konsisten dengan prinsip keadilan distributif.⁸⁵

Pembahasan sebelumnya akan di perkuat lagi menggunakan visualisasi sebagai pemahaman mengenai konsep desil kesejahteraan. Desil merupakan salah satu metode pengelompokan populasi berdasarkan tingkat kesejahteraan dengan membagi seluruh rumah tangga atau individu ke dalam sepuluh kelompok yang masing-masing mewakili 10 persen populasi. Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan besaran pengeluaran per kapita per bulan, yang banyak dalam kajian ekonomi serta sosial dianggap sebagai indikator yang cukup akurat dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga.

Berdasarkan pembagian tersebut, desil 1 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 menggambarkan kelompok dengan kesejahteraan paling tinggi. Klasifikasi desil juga berdasarkan pengeluaran keluarga per kapita, Yang di katakan keluarga berada pada kategori desil 1 yaitu keluarga yang dengan jumlah pengeluarannya lima ratus ribu rupiah (RP 500.000) melalui pembagian ini, tingkat variasi kesejahteraan antar rumah tangga dapat dilihat secara lebih jelas dan sistematis.

⁸⁵ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Aplikasi Resmi Cek Bansos*, Kementerian Sosial Republik Indonesia, diakses pada 8 Juli 2025.

Bagan 4.1 disajikan untuk memberikan gambaran visual mengenai bagaimana populasi terbagi ke dalam sepuluh desil tersebut. Visualisasi ini membantu menunjukkan bahwa tidak semua KPM atau rumah tangga berada pada kondisi ekonomi yang sama, karena masing-masing desil menggambarkan posisi ekonomi yang berbeda dalam struktur kesejahteraan masyarakat.

Bagan 4.1 Klasifikasi Desil Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan



Sumber: Aplikasi Resmi Kementerian Sosial Cek Bansos

Melalui penyajian dalam Tabel 4.4 dijelaskan secara lebih rinci mengenai kategori kesejahteraan yang melekat pada setiap kelompok desil. Selain menunjukkan posisi desil, tabel ini juga menampilkan kisaran pengeluaran per kapita per bulan yang digunakan sebagai dasar klasifikasi. Misalnya, rumah tangga dengan pengeluaran di bawah Rp 500.000 per kapita per bulan masuk dalam kategori *miskin ekstrem* (Desil 1), sementara rumah tangga dengan pengeluaran di atas Rp 1,25 juta per kapita per bulan termasuk dalam kelompok *menengah ke atas* (Desil 6–10).

Tabel 4.4 Klasifikasi Desil Berdasarkan Kategori dan Pengeluaran Per Kapita Per Bulan

Desil	Kategori	Pengeluaran Per Kapita Per Bulan
1	Miskin Ekstrem	Rp 500.000
2	Miskin	Rp 500.000 – Rp 650.000
3	Rentan Miskin	Rp 650.000 – Rp 800.000
4	Menengah Bawah	Rp 800.000 – Rp 1 Juta
5	Menengah	Rp 1 Juta – Rp 1,25 Juta
6-10	Menengah ke Atas	Rp 1,25 Juta - > Rp 3 Juta

Sumber: Aplikasi Resmi Kementerian Sosial Cek Bansos

Penerima PKH di Kampung Penuntungan umumnya berasal dari rumah tangga yang berada pada desil 1 walaupun pada desil satu jarang di temukan namun ada pada desil terendah tersebut hingga pada desil 4. Meskipun rumah tangga yang benar-benar masuk desil 1 kategori miskin ekstrem tidak banyak ditemukan, beberapa keluarga tetap tercatat berada pada desil terendah tersebut karena kondisi ekonomi mereka yang sangat rentan. Sementara itu, sebagian besar penerima berada pada desil 2 hingga 4, kondisi ekonomi keluarga-keluarga ini ditandai oleh pendapatan harian yang rendah dan tidak stabil, dominasi pekerjaan informal seperti buruh tani dan pekerja serabutan, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan sanitasi yang layak.⁸⁶

⁸⁶ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Aplikasi Resmi Cek Bansos*, Kementerian Sosial Republik Indonesia, diakses pada 8 Juli 2025.

Pola ini menunjukkan bahwa penyaluran PKH di Kampung Penuntungan memang menyasar kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sekaligus menegaskan pentingnya pemetaan desil untuk memastikan keluarga yang paling membutuhkan dapat teridentifikasi secara lebih objektif.

Sistem desil memang dirancang untuk memastikan ketepatan sasaran, tetapi di lapangan masih ditemukan kasus ketidaktepatan penerima, ada keluarga yang secara ekonomi sudah lebih baik namun masih tercantum sebagai penerima, sedangkan beberapa keluarga yang tergolong desil rendah justru terlewat karena belum terdata secara akurat atau mengalami perubahan kondisi ekonomi yang belum diperbarui dalam sistem. Situasi ini menunjukkan bahwa proses pembaruan data dan verifikasi lapangan masih perlu ditingkatkan agar penyaluran bantuan benar-benar menyasar keluarga yang paling membutuhkan.

Klasifikasi desil seharusnya membantu meminimalkan masalah ini, tetapi realitas di Kampung Penuntungan menunjukkan pentingnya pembaruan data secara rutin serta verifikasi lapangan yang lebih mendalam. Dengan perbaikan tersebut, penyaluran PKH dapat lebih tepat sasaran dan benar-benar menyentuh keluarga yang berada pada kondisi paling rentan.

Terkait proses pengusulan dan penyanggahan, mekanisme yang berlaku di Kampung Penuntungan sebenarnya terdiri dari beberapa jalur, tetapi tidak semuanya dapat difungsikan secara maksimal. Secara ideal, pengusulan dilakukan melalui operator desa atau kampung, namun jalur ini belum berjalan.

Aplikasi SIKS-NG yang seharusnya digunakan untuk pengusulan dari pihak desa juga tidak beroperasi karena alasan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, jalur yang paling aktif digunakan masyarakat adalah pengusulan mandiri melalui aplikasi Cek Bansos. Melalui aplikasi ini, warga dapat mengusulkan diri sendiri, mengusulkan tetangga, hingga melakukan penyanggahan terhadap penerima yang dianggap tidak layak. Setiap laporan yang masuk kemudian akan diverifikasi oleh pendamping melalui kunjungan lapangan dan musyawarah kelayakan bersama aparat kampung. Dalam pelaksanaannya, pendamping mengakui bahwa ketepatan sasaran PKH di Kampung Penuntungan masih menghadapi tantangan. Pendamping menyatakan:

“Ada yang tepat, ada yang tidak. Tantangan kami itu masyarakat yang sudah keenakan menerima bantuan. Ada yang punya mobil, cicilan enam juta sebulan, tapi marah-marah karena tidak dapat PKH lagi.”⁸⁷

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Suparman selaku pendamping PKH Kampung Penuntungan pada tanggal 7 Juli 2025

Fenomena ini muncul karena sebagian masyarakat menganggap PKH sebagai hak yang harus diperjuangkan, meskipun secara ekonomi mereka sudah tidak lagi tergolong miskin. Untuk mengatasi ketidaktepatan sasaran sekaligus mendorong kemandirian KPM yang telah lama menerima PKH, Kementerian Sosial menerapkan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE). Program PPSE ini ditujukan bagi KPM yang memiliki usaha kecil atau keterampilan seperti menjahit, memasak, atau membuat kue. Melalui PPSE, penerima bantuan memperoleh modal usaha sambil tetap mendapatkan PKH selama satu tahun masa transisi hingga mereka dinilai siap untuk graduasi. Namun, pendamping menegaskan bahwa sebagian besar KPM yang sebenarnya memenuhi syarat pemberdayaan justru enggan beralih karena merasa nyaman dengan bantuan konsumtif PKH. Sementara itu, mereka yang sangat ingin mengikuti PPSE justru banyak berasal dari kelompok miskin ekstrem yang belum memiliki usaha, sehingga tidak memenuhi syarat program.⁸⁸

⁸⁸ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE)*. 7 Agustus 2025.

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PKH di Kampung Penuntungan

Jumlah KPM PKH di Kampung Penuntungan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari pendamping PKH dan dokumen lapangan, pada tahun 2025 terdapat 61 KPM yang tercatat aktif sebagai penerima bantuan. Perubahan jumlah ini dipengaruhi oleh dinamika kondisi ekonomi serta sosial masyarakat serta proses pemutakhiran data yang dilakukan pemerintah.⁸⁹

Perkembangan jumlah KPM PKH di Kampung Penuntungan mengalami fluktuasi, yaitu terjadi penurunan dan peningkatan pada setiap tahunnya. Berdasarkan data lapangan dari Koordinator PKH Kecamatan Penanggalan, berikut disajikan perkembangan jumlah KPM PKH di Kampung Penuntungan selama periode 2020-2025.

Tabel 4.5 Perkembangan Jumlah KPM PKH 2020-2025

No.	Tahun	Jumlah KPM PKH
1.	2020	33
2.	2021	36
3.	2022	26
4.	2023	36
5.	2024	58
6.	2025	61

Sumber: Koordinator PKH Kecamatan Penanggalan

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, 22 Juli 2025.

Tabel 4.5 tertera bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan tajam yang disebabkan penilaian ulang kelayakan dan penghapusan KPM yang dinilai sudah tidak memenuhi kriteria. Namun pada tahun 2024 sampai 2025 jumlah KPM kembali meningkat cukup signifikan.

Kenaikan jumlah penerima PKH di Kampung Penuntungan dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama pemutakhiran data dari DTKS ke DTSEN yang membuat proses pendataan lebih akurat. Banyak keluarga miskin yang sebelumnya tidak tercatat akhirnya teridentifikasi sebagai desil 1 hingga 4. Masyarakat juga dapat mengajukan usulan mandiri melalui aplikasi Cek Bansos sehingga jangkauan pendataan semakin luas. Selain itu, verifikasi lapangan yang dilakukan secara lebih ketat oleh pendamping PKH dan aparat kampung memastikan bahwa data penerima sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan perkembangan jumlah KPM di Kampung Penuntungan, pelaksanaan PKH di wilayah ini tidak terlepas dari berbagai kondisi yang memengaruhi efektivitas program. Setelah melihat dinamika penambahan dan pengurangan penerima dari tahun ke tahun, bagian selanjutnya akan menguraikan beberapa aspek penting yang berkaitan dengan pelaksanaan PKH, mengenai faktor pendukung dan penghambat kemudian dapat dianalisis secara lebih tepat dan tidak terlepas dari realitas kehidupan penerima, sehingga keseluruhan analisis mampu menunjukkan bagaimana PKH dijalankan di masyarakat serta sejauh mana program menjawab kebutuhan keluarga miskin dan rentan di Kampung Penuntungan.

a. Faktor Pendukung Pelaksanaan PKH di Kampung Penuntungan

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, pelaksanaan PKH di Kampung Penuntungan secara umum dapat dikatakan berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari berbagai aspek yang menunjukkan bahwa program telah diterima masyarakat, dipahami oleh KPM, serta didukung oleh sistem pendataan dan mekanisme pelaksanaan yang semakin berkembang. Beberapa kondisi di lapangan juga menunjukkan bahwa koordinasi antara pendamping, aparat kampung, dan masyarakat berjalan efektif sehingga program dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan. Berikut faktor pendukung proses pelaksanaan PKH di Kampung Penuntungan:

1) Keberhasilan Pemutakhiran Data melalui DTSEN

Perubahan sistem pendataan melalui DTSEN membuat proses identifikasi keluarga miskin menjadi lebih akurat. Keluarga yang sebelumnya belum terdata kini dapat teridentifikasi dan masuk dalam daftar penerima yang layak. Akurasi data ini berpengaruh positif terhadap ketepatan sasaran program. pernyataan ini di sampaikan oleh pendamping PKH, yang di mana data PKH sekarang sudah menggunakan DTSEN yang lebih terbuka sehingga pendataan lebih efisien dan tepat sasaran ini merupakan salah satu faktor pendukung pelaksanaan PKH di Kampung Penuntungan.⁹⁰

⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Suparman selaku pendamping PKH Kampung Penuntungan pada tanggal 7 Juli 2025

2) Fasilitas Pengusulan Mandiri melalui Aplikasi Cek Bansos

Aplikasi Cek Bansos merupakan fitur *usul mandiri* yang memudahkan masyarakat untuk mengajukan diri sendiri maupun mengusulkan tetangga sebagai calon penerima bantuan sosial. Keberadaan fitur ini memperluas cakupan pendataan serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses verifikasi dan pemutakhiran data. Selain itu, mekanisme usul mandiri juga mendukung prinsip transparansi dalam penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Salah satu KPM mengungkapkan bahwa dirinya dapat terdaftar sebagai penerima PKH karena diusulkan oleh tetangganya melalui aplikasi Cek Bansos. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu BR:

“Saya baru tahun ini menerima bantuan PKH, sebelumnya tidak pernah. Saya terdaftar karena teman saya yang mengusulkan melalui aplikasi Cek Bansos di HP nya, karena merasa kasihan dengan saya.”⁹¹

3) Aktivitas Verifikasi Lapangan oleh Pendamping dan Aparatur Kampung

Pendamping PKH bersama aparatur kampung secara rutin melakukan kunjungan langsung ke rumah calon penerima. Verifikasi ini memastikan bahwa bantuan diberikan kepada keluarga yang benar-benar memenuhi kriteria. Upaya proaktif ini sangat membantu mencegah kesalahan penyaluran.

⁹¹ Wawancara dengan Ibu BR sebagai KPM PKH di Kampung Penuntungan pada tanggal 15 Juli 2025

Pendamping PKH menjelaskan bahwa proses verifikasi dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Sosial dan aparaturnya.

Pendamping PKH mengatakan bahwa:

“ketika ada penyanggahan atau pendaftaran sebagai penerima PKH dari aplikasi Cek Bansos, Operator Dinas Sosial melaporkan kepada pendamping PKH untuk turun ke lapangan melakukan pengecekan kelayakan calon penerima. Hasil survei tersebut kemudian dilaporkan kepada aparaturnya untuk dimusyawarahkan apakah calon tersebut layak atau tidak. Apabila dinyatakan layak, pihak kampung membawa hasil survei ke Dinas Sosial untuk diproses sebagai penerima PKH, selanjutnya dilakukan validasi kembali oleh operator Dinas Sosial.”⁹²

4) Peran Pendamping PKH dalam Sosialisasi dan Penyampaian Informasi

Pendamping memainkan peran penting dalam memberikan pemahaman kepada KPM terkait kebijakan, prosedur, dan perubahan aturan PKH. Bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan literasi, pendamping menjadi sumber informasi yang sangat membantu kelancaran program.

“Di P2K2 kami menyampaikan materi dari Kementerian Sosial, seperti kesehatan, pencegahan stunting, pengasuhan anak, peran orang tua, dan perencanaan ekonomi keluarga. Selain itu, kami juga menjelaskan tentang pencairan dana PKH dan kapan biasanya dana masuk. Kami membantu KPM yang mengalami kesulitan, terutama ibu-ibu lansia.”⁹³

⁹² Wawancara dengan Bapak Suparman selaku pendamping PKH Kampung Penuntungan pada tanggal 7 Juli 2025

⁹³ Wawancara dengan Bapak Suparman selaku pendamping PKH Kampung Penuntungan pada tanggal 7 Juli 2025

5) Pemanfaatan Dana PKH untuk Kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan Anak

Mayoritas KPM memanfaatkan bantuan sesuai komponen, seperti biaya pendidikan, kesehatan balita, dan kebutuhan ibu hamil. Penggunaan dana yang tepat sasaran ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga dan mendukung tujuan utama program.

“Kebanyakan penerima di sini meliputi komponen pendidikan dan kesehatan. Jadi ada anak sekolah, ibu hamil, atau balita. Dana banyak dipakai buat gizi dan perlengkapan sekolah karna memang untuk anak sekolah ini terlalu banyak dana yang harus di keluarkan.”⁹⁴

b. Faktor Penghambat Pelaksanaan PKH di Kampung Penuntungan

Pelaksanaan PKH di Kampung Penuntungan menunjukkan hasil yang cukup baik, akan tetapi implementasinya masih menghadapi kendala, mulai dari kondisi sosial ekonomi masyarakat, keterbatasan infrastruktur, hingga aspek administratif program yang belum sepenuhnya optimal. Hambatan yang ditemukan di lapangan antara lain sebagai berikut:

1) Keterbatasan Ekonomi dan Ketidakstabilan Pendapatan

Banyak KPM bekerja di sektor informal dengan pendapatan tidak tetap. Kondisi ini membuat mereka kesulitan memenuhi komitmen PKH, terutama terkait pendidikan dan kesehatan anak. Dalam situasi mendesak, bantuan sering dialihkan untuk kebutuhan harian sehingga tujuan jangka panjang program tidak optimal tercapai.

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Suparman selaku pendamping PKH Kampung Penuntungan pada tanggal 7 Juli 2025

“Sebagian masyarakat di sini yang dapat bantuan kepala rumah tangganya bukan pekerja tetap, melainkan mereka bekerja sebagai buruh harian dan petani kecil, jadi penghasilannya tidak menentu. Pastilah kalau ada kebutuhan mendesak seperti makan atau biaya lain untuk kebutuhan keseharian rumah tangga, dana PKH dipakai dulu untuk kebutuhan sehari-hari, jadi untuk pendidikan atau kesehatan anak bisa jadi tertunda.”⁹⁵

Pernyataan tersebut di sampaikan oleh Bapak Kepala RT Kampung Penuntungan, Bapak Samsul Berutu, dan diperkuat oleh hasil wawancara dengan KPM PKH. Ketika peneliti menanyakan hal yang sama terkait penggunaan dana PKH dalam kondisi kebutuhan mendesak, KPM menjelaskan sebagai berikut:

“yang cari pemasukan rumah tangga cuma suami itu pun kerjanya tidak tetap, kadang ada upah, kadang tidak. Terkadang seminggu tiga kali dapat upah saja belum tentu apalagi kalo harga sawit turun, jadi kalau bantuan PKH cair dan ada kebutuhan mendesak seperti makan atau keperluan rumah, uangnya kami pakai dulu untuk itu. Untuk biaya sekolah atau ke posyandu anak kadang menyusul belakangan atau kadang kami akali bagaimana solusinya.”⁹⁶

3) Rendahnya Pemahaman KPM Terhadap Penggunaan Digital

Banyak penerima bantuan belum terbiasa menggunakan perangkat digital maupun mesin ATM. Hal ini meningkatkan ketergantungan pada pendamping untuk proses administrasi dan transaksi keuangan. Rendahnya pengetahuan terkait penggunaan digital membuat implementasi sistem modern belum berjalan optimal.⁹⁷

⁹⁵ Wawancara dengan Bapak Samsul Berutu sebagai Ketua RT Kampung Penuntungan pada tanggal 7 Juli 2025

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu IS sebagai KPM PKH di Kampung Penuntungan pada tanggal 15 Juli 2025.

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Suparman selaku pendamping PKH Kampung Penuntungan pada tanggal 7 Juli 2025

4) Keterbatasan Akses terhadap Fasilitas Perbankan dan ATM

Tidak tersedianya fasilitas perbankan dan ATM di wilayah kampung membuat penerima manfaat harus menempuh jarak jauh untuk mencairkan bantuan. Pernyataan tersebut di sampaikan oleh Ibu EY yang merupakan salah satu KPM PKH. Hal ini menimbulkan keterlambatan pencairan, biaya transportasi tambahan, antrean panjang, dan kegagalan transaksi pada periode pencairan tertentu.⁹⁸

5) Ketidaktepatan Sasaran dalam Penetapan Penerima Bantuan

Masih ditemukan keluarga yang tidak layak tetapi terdaftar sebagai penerima, sementara keluarga yang lebih membutuhkan tidak tercatat. Pendamping PKH mengungkapkan bahwa Ketidaktepatan ini dipengaruhi oleh basis data yang belum mutakhir, verifikasi yang terbatas dan faktor sosial dalam pendataan. Kondisi tersebut menimbulkan kecemburuan sosial, menurunkan kepercayaan masyarakat, serta mengurangi efektivitas program.⁹⁹

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu EY sebagai KPM PKH di Kampung Penuntungan pada tanggal 15 Juli 2025.

⁹⁹ Wawancara dengan Bapak Suparman selaku pendamping PKH Kampung Penuntungan pada tanggal 7 Juli 2025

3. Dampak PKH Terhadap Kesejahteraan Masyarakat kampung Penuntungan

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kampung Penuntungan memberikan pengaruh yang cukup luas terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat baik pada dampak ekonomi maupun sosial KPM PKH. Dampak tersebut dapat dilihat pada empat aspek utama yaitu : pendidikan, kesehatan, ekonomi rumah tangga dan sosial.

a. Dampak pada pendidikan

PKH berperan penting dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Sebagian besar KPM menggunakan dana bantuan untuk keperluan sekolah, transportasi, serta kebutuhan penunjang lainnya. Bantuan ini membantu menjaga keberlanjutan pendidikan anak karena keluarga tidak lagi terlalu terbebani oleh biaya pendidikan dasar.

Persyaratan kehadiran sekolah anak pada program PKH ini membuat orang tua lebih memperhatikan perkembangan pendidikan anak. Pendamping menjelaskan bahwa komponen pendidikan merupakan salah satu yang paling banyak dimiliki oleh KPM di kampung ini. Sejumlah orang tua mengakui bahwa tanpa PKH, mereka akan kesulitan menyekolahkan anak dikarenakan terbebani akan kebutuhan sekolah disebabkan oleh pendapatan yang tidak stabil.

“Kalau tidak ada PKH, menyekolahkan anak terasa sangat terbebani karna dari seragam sekolahnya saja lebih dari satu pasang baju belum untuk tas, sepatu, buku itu semua tidak cukup sedikit pengeluarannya, apalagi kalo ada yang anaknya yang masih sekolah lebih dari 2 anak sudah di pastikan ada salah satu atau bisa jadi lebih yang akan putus sekolah.”¹⁰⁰

b. Dampak pada kesehatan

PKH mendorong perubahan perilaku kesehatan, khususnya pada ibu hamil, balita, dan anak usia sekolah. Syarat pencairan yang mensyaratkan pemenuhan komitmen kesehatan membuat KPM lebih rutin memeriksakan diri ke posyandu dan fasilitas kesehatan. Ibu hamil diwajibkan melakukan pemeriksaan kehamilan, sementara balita harus mendapatkan pemantauan tumbuh kembang.

Pendamping menyebut bahwa PKH memperkuat kesadaran keluarga akan pentingnya gizi dan kesehatan anak. Hal ini terlihat dari meningkatnya kunjungan ke posyandu serta perubahan perilaku dalam memperhatikan makanan bergizi, meskipun jumlah bantuan terbatas.¹⁰¹

c. Dampak Ekonomi Keluarga

PKH tidak secara langsung meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga, tetapi mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga. Banyak KPM yang menggantungkan biaya sekolah dan kesehatan anak pada PKH, sehingga pendapatan mereka dapat dialihkan untuk kebutuhan lain seperti pangan, listrik, atau modal usaha kecil.

¹⁰⁰ Wawancara dengan 4 orang informan yaitu Ibu MY, ER, BR dan GY yang merupakan KPM PKH di Kampung Penuntungan, 15 Juli 2025.

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Suparman selaku pendamping PKH Kampung Penuntungan pada tanggal 7 Juli 2025

Sebagian keluarga mengungkapkan bahwa bantuan ini menjadi penyelamat ketika pendapatan suami sebagai buruh, petani, atau pedagang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Pendapatan keluarga yang tidak menentu membuat bantuan PKH menjadi penyangga ekonomi, terutama pada masa-masa harga kebutuhan naik.¹⁰²

d. Dampak Sosial

PKH juga turut memberikan pengaruh sosial pada perilaku dan pola hidup keluarga. Melalui kegiatan P2K2 yang dilaksanakan setiap bulan, KPM menerima materi mengenai pengasuhan anak, kesehatan keluarga, pengelolaan keuangan, perencanaan masa depan, serta pencegahan stunting. Materi ini secara perlahan mengubah cara pandang keluarga terhadap pengelolaan rumah tangga. Namun, perubahan ini tidak terjadi secara merata. Sebagian KPM mampu menerapkan materi P2K2, tetapi sebagian lainnya masih menghadapi kendala seperti rendahnya pengetahuan, keterbatasan pemahaman, dan rasa ketergantungan pada program bantuan.

¹⁰² Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan pendamping PKH dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada saat pertemuan P2K2 di Kampung Penuntungan, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, 10 Juli 2025.

Program PKH telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, akan tetapi pelaksanaan PKH di Kampung Penuntungan juga masih menyisakan sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan efektivitas program. Salah satu tantangan utama adalah adanya kecenderungan ketergantungan pada bantuan. Sebagian keluarga merasa nyaman dengan keberadaan PKH sehingga kurang berupaya mencari alternatif peningkatan pendapatan sendiri. Pendamping menilai bahwa pola pikir ketergantungan ini menjadi salah satu hambatan terbesar dalam proses pemberdayaan, karena tujuan akhir program adalah kemandirian keluarga miskin.

Pelaksanaan PKH di Kampung Penuntungan ini sudah berjalan cukup baik, namun masih ditemukan keluarga yang sebenarnya telah mengalami peningkatan ekonomi, namun tetap berupaya mempertahankan status sebagai penerima PKH. Kondisi ini menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat karena dianggap tidak mencerminkan asas keadilan. Permasalahan tersebut memperkuat pentingnya pemutakhiran data dan evaluasi berkala agar penerima benar-benar sesuai dengan kriteria kemiskinan yang ditetapkan pemerintah.

Beban kerja pendamping yang cukup besar juga menjadi tantangan tersendiri. Pendamping PKH harus menjangkau wilayah yang luas dengan jumlah KPM yang terus bertambah setiap tahun. Pada masa pembaruan data dan saat pencairan bantuan, pendamping sering kali kewalahan karena harus memastikan seluruh administrasi, verifikasi, serta pemenuhan komitmen KPM berjalan sesuai ketentuan.

Tantangan lainnya adalah rendahnya tingkat pemahaman sistem digital. Mayoritas KPM belum terbiasa menggunakan aplikasi digital seperti Cek Bansos untuk memantau status bantuan atau memperbarui data. Banyak di antara mereka tidak memiliki perangkat yang memadai atau kesulitan memahami teknologi.

Sebagai upaya mengurangi ketergantungan KPM terhadap bantuan, Kementerian Sosial meluncurkan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE). Program ini ditujukan bagi keluarga penerima yang telah mendapatkan PKH selama lebih dari lima tahun dan memiliki keterampilan atau usaha kecil seperti menjahit, memasak, atau membuat kue. Melalui PPSE, KPM diberikan dukungan modal sesuai kemampuan dan potensi usaha yang mereka miliki sehingga diharapkan dapat tumbuh menjadi keluarga mandiri dan pada akhirnya dapat graduasi dari PKH. Meskipun demikian, pendamping menyebutkan bahwa tidak semua KPM bersedia mengikuti program ini karena sebagian masih merasa lebih nyaman menerima bantuan rutin dari PKH.

PKH telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial, namun implementasinya tetap menghadapi beberapa hambatan yang perlu dibenahi. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan PKH tidak hanya bergantung pada besarnya bantuan, tetapi juga pada kesiapan masyarakat, kualitas pendampingan, serta efektivitas sistem pendataan dan pemberdayaan yang menyertainya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan PKH di Kampung Penuntungan, program ini memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan keluarga miskin, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan. Implementasi PKH di wilayah ini berjalan sesuai mekanisme nasional, dengan pendamping PKH memainkan peran penting dalam sosialisasi, bimbingan, pemantauan komitmen pendidikan dan kesehatan, serta pengawasan pemanfaatan bantuan. Peran pendamping menjadi sangat krusial mengingat sebagian besar KPM memiliki keterbatasan pengetahuan terkait penggunaan sistem digital, kesulitan memahami aplikasi Cek Bansos, serta akses yang terbatas terhadap informasi resmi. Keberadaan pendamping menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, aparatur kampung, dan masyarakat penerima manfaat, sehingga penerapan kebijakan PKH dapat dipahami dengan lebih mudah oleh KPM.

Pelaksanaan penyaluran bantuan menghadapi kendala akibat kondisi geografis dan minimnya fasilitas perbankan. KPM harus menempuh jarak cukup jauh untuk mengecek dan mencairkan bantuan, menimbulkan biaya tambahan, waktu tempuh yang panjang, serta ketidakpastian status pencairan. Rendahnya literasi digital menyebabkan sebagian KPM masih sangat bergantung pada pendamping dalam melakukan pengecekan dan pencairan bantuan.

Perubahan sistem pendataan dari DTKS ke DTSEN membawa pengaruh signifikan terhadap penetapan penerima PKH. Penggunaan klasifikasi desil memudahkan identifikasi keluarga yang benar-benar miskin atau rentan, sehingga mayoritas penerima berasal dari desil 1 hingga desil 4. Proses pembaruan data juga memunculkan dinamika berupa penambahan dan pengurangan penerima, serta masih ditemukannya ketidaktepatan sasaran yang menunjukkan perlunya verifikasi lapangan yang lebih intensif.

Faktor pendukung pelaksanaan PKH di Kampung Penuntungan cukup kuat, termasuk meningkatnya akurasi data melalui DTSEN, adanya fitur usul mandiri pada aplikasi Cek Bansos, serta koordinasi antara pendamping dan aparatur kampung dalam verifikasi lapangan. Pendamping aktif memberikan sosialisasi dan bimbingan mengenai aturan program, perubahan kebijakan, dan pemenuhan komitmen pendidikan serta kesehatan, sementara KPM umumnya memanfaatkan bantuan sesuai komponen program, terutama untuk pendidikan anak, kesehatan balita, dan kebutuhan gizi keluarga.

Hambatan pelaksanaan PKH tetap cukup besar dan memengaruhi efektivitas program. Faktor yang berpengaruh meliputi rendahnya pendidikan dan pemahaman KPM, ketidakstabilan pendapatan, keterbatasan akses perbankan, serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital. Beban kerja pendamping tinggi karena harus melakukan pemutakhiran data, sosialisasi perubahan sistem, serta membantu KPM yang tidak mampu mengakses aplikasi. Ketidaktepatan sasaran dan kecemburuan sosial juga masih menjadi tantangan yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap program.

Program PKH terbukti memberikan dampak positif pada berbagai aspek kesejahteraan keluarga, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi rumah tangga, dan pengetahuan sosial keluarga. Bantuan membantu anak tetap bersekolah, mendorong keluarga rutin memanfaatkan layanan kesehatan, serta menjadi bantalan keuangan bagi keluarga dengan pendapatan tidak tetap. Kegiatan P2K2 memberikan edukasi tambahan mengenai pengasuhan, gizi, perencanaan keuangan, dan pola hidup sehat, meskipun tidak semua KPM dapat menerapkannya secara optimal karena keterbatasan pendidikan. Efektivitas PKH dapat ditingkatkan melalui perbaikan akses layanan keuangan, peningkatan literasi digital, pembaruan data yang lebih akurat, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi untuk mendorong kemandirian keluarga miskin dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan di masa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, beberapa saran dapat diberikan untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas PKH di masa mendatang. Saran ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pendamping dan pihak terkait agar pelaksanaan program semakin optimal dan mampu memberikan dampak yang lebih berkelanjutan bagi keluarga penerima manfaat.

1. Saran untuk Pemerintah (Kemensos & Pemerintah Daerah)

- a. Memperkuat implementasi DTSEN dengan meningkatkan frekuensi verifikasi lapangan agar inclusion dan exclusion error semakin diminimalkan.

- b. Menyelenggarakan pelatihan terkait pemahaman penggunaan digital bagi masyarakat, khususnya terkait penggunaan aplikasi Cek Bansos dan pengusulan mandiri.
- c. Mengaktifkan kembali operator desa atau petugas khusus pendataan agar tidak seluruh beban teknis ditanggung pendamping.
- d. Memperluas cakupan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) dengan *monitoring* yang jelas sehingga KPM tidak ragu mengikuti kegiatan pemberdayaan.
- e. Meningkatkan infrastruktur digital dan jaringan internet untuk mendukung kelancaran pendataan dan pelayanan.

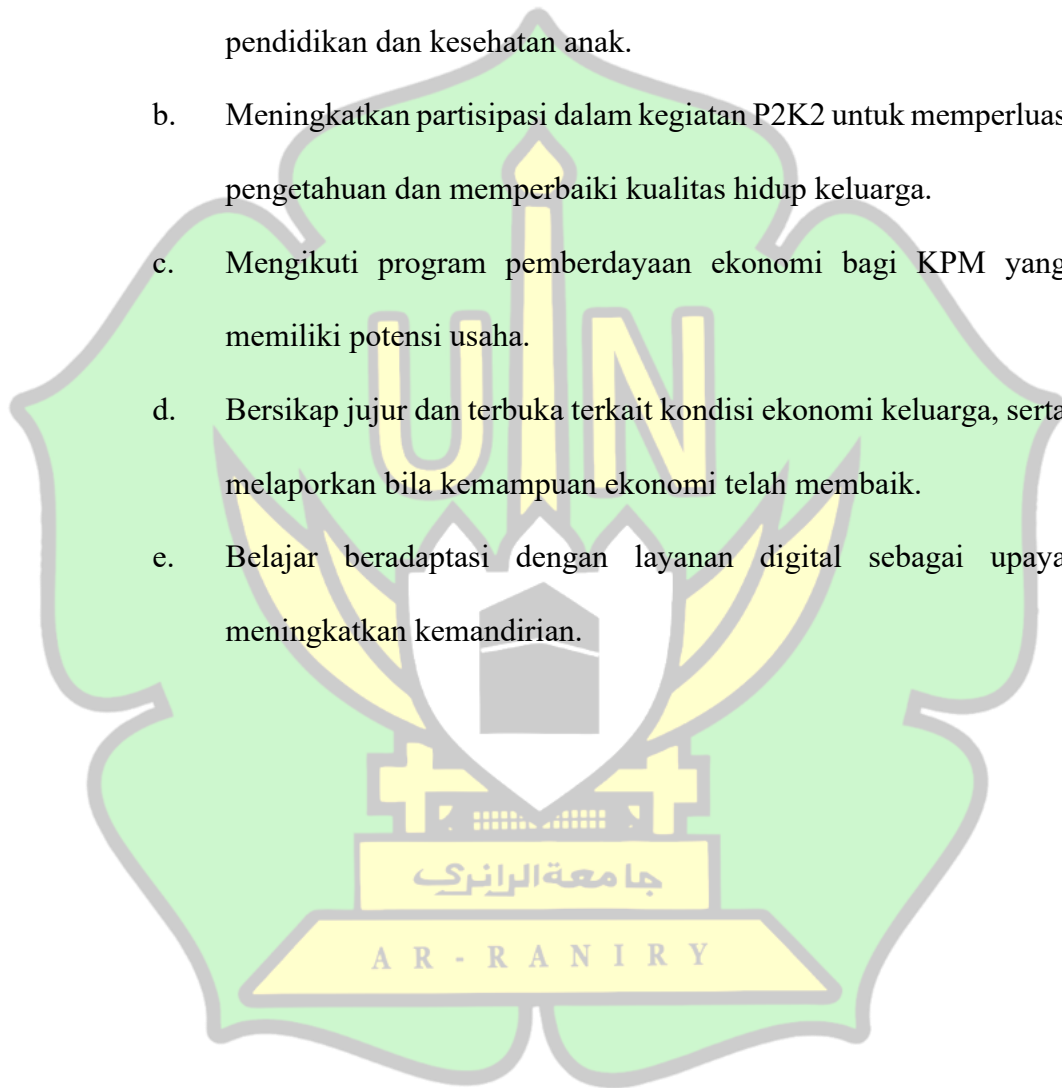
2. Saran untuk Pendamping PKH

- a. Memperkuat pendekatan persuasif dalam P2K2, terutama terkait perubahan *mindset*, kemandirian ekonomi dan pengelolaan keuangan.
- b. Melakukan identifikasi dini terhadap KPM yang berpotensi lulus mandiri dan mengarahkan mereka mengikuti program PPSE.
- c. Meningkatkan dokumentasi dan pelaporan digital agar lebih tertib serta mudah ditelusuri.
- d. Mengoptimalkan kerja sama dengan pemerintah kampung, RT/RW, sekolah, dan posyandu dalam verifikasi dan edukasi KPM.

- e. Memberikan pendampingan khusus bagi KPM yang masih kesulitan menggunakan teknologi digital.

3. Saran untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

- a. Memanfaatkan bantuan sesuai tujuan utama PKH, yakni pendidikan dan kesehatan anak.
- b. Meningkatkan partisipasi dalam kegiatan P2K2 untuk memperluas pengetahuan dan memperbaiki kualitas hidup keluarga.
- c. Mengikuti program pemberdayaan ekonomi bagi KPM yang memiliki potensi usaha.
- d. Bersikap jujur dan terbuka terkait kondisi ekonomi keluarga, serta melaporkan bila kemampuan ekonomi telah membaik.
- e. Belajar beradaptasi dengan layanan digital sebagai upaya meningkatkan kemandirian.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agnes Pradina S. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kluwut Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes*. Tesis.Semarang: UNNES, 2019.
- Aisyah, Burhany. *Kajian kemiskinan dan masalah sosial di Indonesia*. Salemba Raya, 2001.
- Ananta, Aries. *Ilmu sosial dan kekuasaan di Indonesia*. Gramedia Group, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta, 2016
- Arikunto, ddk. *Evaluasi program pendidikan: Pedoman teoritis bagi praktisi pendidikan*. Bumi Aksara, 2004.
- Criswardani, Suryawati. *Kemiskinan dan problematika sosial di Indonesia*. Bumi Aksara, 2005.
- Dewi Rahayu, Khusnul. *Studi analisis kebijakan*. Pustaka Setia, 2016.
- Dungtji, Munawar. *Memahami pengertian dan kebijakan dalam APBN*. Mandar Madju, 2014
- Farhan, Yunus. *Problematic kemiskinan di Indonesia*. Alumni, 2007.
- Hamzah, Awaluddin. *Kemiskinan di desa: Struktural dan kultural*. Bima Aksara, 2008.
- Harbani Pasalong, Muh. *Metode penelitian administrasi publik*. Alfabeta, 2020.
- Mardimin, Yohanes. *Krisis sosial dan proses pembangunan di Indonesia*. Kanisius, 2001.
- Moleong, Lexy J. *Penelitian kualitatif*. Rosda Karya, 2001.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif* (Ed. revisi). PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Mulyadi, Deddy. *Studi kebijakan publik dan pelayanan publik*. Alfabeta, 2015.
- Sekaran, Uma., & Bougie, Roger. *Research methods for business: A skill-building approach* (8th ed.). Wiley, 2020.
- Wibawa, Samodera. *Kebijakan publik: Proses dan analisis*. Intermedia, 2000.

Wirutomo, Wahyu. *Kemiskinan absolut dan kemiskinan struktural di Indonesia*. Bina Cipta, 2007.

Suharto, Edi. *Kebijakan sosial: Sebuah pengantar*. Alfabeta, 2009.

Creswell, John W. *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Pustaka Pelajar, 2016.

Sugiyono. *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta, 2017.

Sugiyono. *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta, 2019.

Sugiyono. *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta, 2022.

Miles, Matthew B., & Huberman, A. Michael. *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage Publications, 1994.

Spradley, James P. *Participant observation*. Holt, Rinehart and Winston, 1980.

Patton, Michael Quinn. *Qualitative research & evaluation methods* (3rd ed.). Sage Publications, 2002.

Krueger, Richard A., & Casey, Mary Anne. *Focus groups: A practical guide for applied research* (5th ed.). Sage Publications, 2015.

DOKUMEN, LAPORAN dan SUMBER RESMI

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *Aplikasi Cek Bansos: Inovasi Kementerian Sosial untuk Pengelolaan Bansos Tepat Sasaran*.

Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam. (2024). *Kecamatan Penanggalan dalam angka 2024*.

JURNAL

Alfiyaturrohmah, & Setiawan, Z. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Ngagel Kecamatan Dukuhesti Kabupaten Pati Tahun 2021. *SPEKTRUM*, 2(2), 2023.

Dyah Ayu Virgoreta, Tri., Nur Pratiwi, Ratih., & Suwondo. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(12), 2017.

Farida Umaroh., & Sutjiatmi, Sri. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Kupu Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. *Indonesian Governance Journal*, 2(2), 2019.

Liahati., & Larasati, Dewi Citra. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 2019.

Rijali, Ahmad. Analisis data kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 2018.

Virgoreta, Tri Dyah Ayu., Nur Pratiwi, Ratih., & Suwondo. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurusan Administrasi Publik*, 2(12), 2015.

SKRIPSI

Syahriani. (2016). *Kontribusi Program Keluarga Harapan dalam menunjang pendidikan siswa kurang mampu* (Skripsi). Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Sosial.

UNDANG-UNDANG

Peraturan presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sisten Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tindak Percepatan Pencapaian Sasaran Program Pro-Rakyat.

Peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang PENCEPATAN Penanggulangan Kemiskinan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ledygne Luvita Sesa
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekan Baru, 08 Juli 2003
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 220405020
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Dusun Benteng Sari Desa Penuntungan
 - a. Kecamatan : Penanggalan
 - b. Kabupaten/Kota : Subulussalam
 - c. Provinsi : Aceh
8. No. Telp/Hp : 082277030336

Riwayat Pendidikan

9. SD/MI : SD Negeri 1 Penuntungan Tahun Lulus 2015
10. SMP/MTs : MTs Swasta Jabal Rahma Tahun Lulus 2018
11. SMA/MA : SMK Negeri 1 Penanggalan Tahun Lulus 2021

Orang Tua/Wali

12. Nama Ayah : Miswanto
13. Nama Ibu : Lestari
14. Pekerjaan Orang Tua : Petani
15. Alamat Orang Tua : Dusun Benteng Sari Desa Penuntungan
 - a. Kecamatan : Penanggalan
 - b. Kabupaten/Kota : Subulussalam
 - c. Provinsi : Aceh

Banda Aceh, 27 Januari 2026
Peneliti


Ledygne Luvita Sesa

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian di Dinas Sosial Kota Subulussalam



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B.1440/Un.08/FDK.I/PP.00.9/07/2025

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Dinas Sosial Kota Subulussalam

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220405020

Nama : LEDYGNE LUVITA SESA

Program Studi/Jurusan : Kesejahteraan Sosial

Alamat : Jln. Utama Rukoh Syiah Kuala

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI KAMPUN PENUNTUNGAN KECAMATAN PENANGGALAN KOTA SUBULUSSALAM**

Banda Aceh, 03 Juli 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Berlaku sampai : 31 Juli 2025

Dr. Mahmuddin, M.Si.

NIP. 197210201997031002

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian di Kampung Penuntungan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B.1646/Un.08/FDK.I/PP.00.9/08/2025

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Kepala Kampung Penuntungan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220405020

Nama : LEDYGNE LUVITA SESA

Program Studi/Jurusan : Kesejahteraan Sosial

Alamat : Jln. Utama Rukoh Syiah Kuala

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI KAMPUN PENUNTUNGAN KECAMATAN PENANGGALAN KOTA SUBULUSSALAM**

Banda Aceh, 06 Agustus 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Berlaku sampai : 13 Januari 2025

Dr. Mahmuddin, M.Si.

NIP. 197210201997031002

AR - RANIRY

Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
KECAMATAN PENANGGALAN
KAMPUNG PENUNTUNGAN**

Jln. Perotokol Telp.

Kode pos. 24782

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/459/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samsul Berutu
Jabatan : Kepala Kampung Penuntungan
Alamat : Dusun Air Terjun Kampung Penuntungan Kecamatan Penanggalan
Kota Subulussalam

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ledygne Luvita Sesa
NIM : 220405020
Jurusan : Kesejahteraan Sosial
Fakultal : Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Alamat : Jln. Utama Rukoh Syiah Kuala

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian Ilmiah di Kampung Penuntungan dalam rangkan penulisan skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI KAMPUN PENUNTUNGAN KECAMATAN PENANGGALAN KOTA SUBULUSSALAM.**

Demikian surat keterangan ini sampaikan agar dapat di pergunakan seperlunya.

Penuntungan 28 Agustus 2025

Kepala Kampung Penuntungan



SAMSUL BERUTU

Lampiran 4: Foto Dokumentasi Penelitian



Foto kegiatan setelah pelaksanaan wawancara dengan Bapak Samsul Berutu selaku Kepala Rukun Tetangga (RT) di Kantor Desa Kampung Penuntungan dalam rangka memperoleh informasi pendukung penelitian.



Foto dokumentasi kegiatan peneliti saat berkoordinasi dengan petugas bagian surat-menyurat dan pendataan Kampung Penuntungan dalam rangka pengumpulan data penelitian.



Foto kegiatan saat wawancara berlangsung antara peneliti dan Pendamping PKH di Kampung Penuntungan.



Foto kegiatan ketika Bapak RT turut hadir dan berinteraksi dengan Pendamping PKH, sekaligus menanyakan beberapa hal terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kampung Penuntungan. Pada momen ini, peneliti memperoleh informasi yang lebih akurat dan mendalam terkait kondisi penerima manfaat serta pelaksanaan PKH di wilayah tersebut.



Foto kegiatan saat pertemuan P2K2 dilaksanakan di rumah Ketua Kelompok PKH, di mana peneliti turut menghadiri kegiatan bukan hanya untuk melakukan observasi tetapi peneliti juga berkesempatan memberikan pemaparan terkait PKH



Foto kegiatan yang di ambil setelah pelaksanaan pertemuan P2K2, sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan pembinaan kepada KPM.



Foto kegiatan wawancara peneliti bersama Ketua Kelompok PKH, di mana Pendamping PKH dan salah satu KPM juga hadir untuk menyampaikan masukan dan keluhan yang berkaitan dengan PKH.



Foto kegiatan kunjungan peneliti ke rumah KPM PKH untuk melakukan wawancara langsung dan mendengarkan penjelasan mengenai kebutuhan serta kendala yang dihadapi.



Foto kegiatan saat peneliti sedang melakukan wawancara di salah rumah KPM PKH yang memiliki usaha kecil dari keahlian membuat jamu.



Foto kegiatan ini di ambil setelah selesai melakukan kegiatan wawancara dengan salah satu KPM PKH yang memiliki usaha kecil guna menambah penghasilan keluarga.



Foto kegiatan saat peneliti melakukan kegiatan wawancara mendalam di rumah KPM PKH guna memperoleh data yang lebih akurat mengenai situasi sosial dan ekonomi keluarga.



Foto kegiatan saat peneliti melakukan wawancara di rumah KPM PKH yang memiliki usaha kecil mandiri, untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan usaha serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi keluarga.

Lampiran 5: Foto Dokumentasi Sidang Munaqasyah Skripsi



Flayer Sidang Munaqasah Skripsi dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengurangi Kemiskinan di Kampung Penunangan Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam”.



Foto bersama mahasiswa atau peneliti dengan dosen pembimbing dan dosen penguji setelah pelaksanaan Sidang Munaqasah Skripsi dinyatakan lulus.